

BIP's

JURNAL BISNIS PERSPEKTIF

FAKULTAS EKONOMI

Anita Permatasari
Martinus Sony Erstiawan

Keberlanjutan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Akuntansi Pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya

Christian Herdinata

Pengaruh *Managerial Ownership* dan *Institutional Ownership* Terhadap *Leverage*: Sebuah Tinjauan Teoritis

Setiadi Alim Lim
Lilik Indrawati

Antisipasi Peraturan Perpajakan di Indonesia Terhadap Praktek Perpajakan Negara-Negara *Tax Haven*

Susiani

Analisis Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan-Perusahaan Makanan dan Minuman yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia

Thyophoida Wanty Suryani Panjaitan
Maria Widyastuti

Analisis *Fashion Involvement* dan Emosi Positif Terhadap *Impulse Buying* Pada Matahari *Department Store* Surabaya

V. Ratna Inggawati

Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Perguruan Tinggi “X” di Surabaya

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

BIP's

JURNAL BISNIS PERSPEKTIF

BIP's merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika setiap 6 bulan sekali yang sebelumnya bernama Jurnal Darma Cendika Manajemen & Akuntansi. Jurnal ditujukan terutama untuk mempublikasikan pemikiran, gagasan, hasil kajian, dan penelitian dari dosen Fakultas Ekonomi Unika Darma Cendika

Pengurus Redaksi

Pelindung :
Rektor UKDC, Dra. M. Yovita R. Pandin., M.M.

Penanggung Jawab :
Dra. Maria Widyastuti.,M.M

Ketua Penyunting :
Lilik Indrawati,S.E.,M.M

Wakil Ketua Penyunting :
V.Ratna Inggawati,S.E.,M.M
Thyophoida W.S. Panjaitan,S.E.,M.M

MITRA BEBESTARI :
DR. David Kodrat (Universitas Ciputra Surabaya)
Prof. DR. Wilopo (STIE Perbanas Surabaya)
DR. Lilik Rudianto, MBA (Universitas Airlangga)
Dra.Jeanne A. Wawolangi, M.Si.,Ak (Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya)
Drs.ec. Bruno Hami,M.M (Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya)
Drs.B.Suprpto,M.Si (Praktisi Pendidikan-Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya)

Penyunting Pelaksana :
Anita Permatasari, S.E.,M.M., Ak.
Martinus Sony Erstiawan., S.E., M.Ak.

Alamat Redaksi :
Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)
Fakultas Ekonomi UNIKA Darma Cendika
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117
Telp. 031. 5946482, 5914157, 5995924; Email : fe_ukdc@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian, konseptual, aplikasi, resensi buku dan tulisan praktis dalam bidang ekonomi dan bisnis.
2. Artikel yang dikirim ke Jurnal Bisnis Perspektif adalah artikel yang tidak sedang dikirim ke jurnal atau terbitan lain yang belum dipublikasikan dalam jurnal lain.
3. Sistematika Penulisan memuat sebagai berikut:
 - a. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, dengan diikuti oleh kata kunci dengan jumlah total kata kunci minimum adalah kurang lebih 10 kata.
 - b. Pendahuluan
 - c. Metode Penelitian
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - e. Kesimpulan dan saran
 - f. Daftar Pustaka
4. Format Penulisan:
 - a. Artikel diketik rapi dengan 1,5 spasi dengan jenis huruf Time New Roman ukuran 12 point.
 - b. Panjang artikel berkisar 12-25 halaman dimana setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, yang sesuai dengan isi tabel dan gambar.
 - c. Daftar pustaka ditulis alphabetis sesuai dengan nama akhir (tanpa gelar akademik) baik penulis asing maupun penulis Indonesia.
 - d. Artikel dikirim sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan menyerahkan CD.
 - e. Kepastian pemuatan ataupun penolakan akan diinformasikan maksimal 2 minggu setelah diterima, serta artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

BIP's

JURNAL BISNIS PERSPEKTIF

DAFTAR ISI

Keberlanjutan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Akuntansi Pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya Anita Permatasari Martinus Sony Erstiawan	Hal. 123 - 156
Pengaruh <i>Managerial Ownership</i> dan <i>Institutional Ownership</i> Terhadap <i>Leverage</i> : Sebuah Tinjauan Teoritis Christian Herdinata	Hal. 157 - 167
Antisipasi Peraturan Perpajakan di Indonesia Terhadap Praktek Perpajakan Negara-Negara <i>Tax Haven</i> Setiadi Alim Lim Lilik Indrawati	Hal. 168 - 193
Analisis Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan-Perusahaan Makanan dan Minuman yang <i>Go Public</i> di Bursa Efek Indonesia Susiani	Hal. 194 - 211
Analisis <i>Fashion Involvement</i> dan Emosi Positif Terhadap <i>Impulse Buying</i> Pada Matahari <i>Department Store</i> Surabaya Thyophoida Wanty Suryani Panjaitan Maria Widyastuti	Hal. 212 - 230
Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Perguruan Tinggi "X" di Surabaya V. Ratna Inggawati	Hal. 231 - 243

PENGANTAR REDAKSI

BIP's merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika setiap 6 bulan sekali. Jurnal ini ditujukan untuk mempublikasikan pemikiran, gagasan, hasil kajian, dan penelitian dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika dan dari perguruan tinggi lainnya.

BIP's menerima artikel dari hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, dan sosial, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Penelitian yang dimuat dalam BIP's bukan merupakan penelitian yang pernah dimuat atau dipublikasikan pada media cetak atau jurnal lainnya dan penulis bertanggung jawab terhadap seluruh isi penelitian.

Semua artikel yang masuk akan dilakukan penyeleksian melalui proses tanpa identitas (*blind review*) oleh tim editor BIP's dengan memperhatikan: terpenuhinya persyaratan pedoman penulisan artikel, metode riset yang digunakan, dan signifikansi hasil riset, gagasan atau hasil kajian terhadap pengembangan ilmu, pendidikan, dan praktek-praktek dibidang ekonomi dan bisnis. Dewan penyunting bertanggung jawab untuk mengadakan telaah konstruktif, dan bila dipandang perlu dapat menyampaikan evaluasi kepada penulis artikel yang berguna untuk melakukan perbaikan sebelum dimuat di jurnal.

Artikel dapat dikirimkan kepada :

Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)

Alamat Redaksi :

Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117
Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924
Email: fe_ukdc@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman naskah sesuai ketentuan di atas, dan paling lambat diterima satu bulan sebelum jurnal diterbitkan.

**KEBERLANJUTAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
AKUNTANSI PADA 5 (LIMA) PERGURUAN
TINGGI SWASTA DI SURABAYA¹**

Anita Permatasari

Martinus Sony Erstiawan

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

Curriculum as a high education implementation tool that has to be dynamic, therefore periodically it is required to be evaluated and enhanced in accordance with the development of knowledge and technology. The current issue is how the continuance of competency-based curriculum increases the quality of accounting education at five private universities in Surabaya. Research question related to graduating competency standard, curriculum structure, learning materials, syllabus and the learning implementation plan in standing by the learning activity, the role of lecturer in enacting SCL-centered learning method, appraisal of learning result and learning process evaluation. The objective of this study is to examine and to evaluate development process and the continuance of competency-based curriculum implementation to accounting high education. The used research type is qualitative description research with Research and Development (R&D). In the education research there are research of knowledge aspect and education practices, knowledge and curriculum practices, learning practices, knowledge with guidance and counseling practices, and knowledge with education management practices. If they are carried out in the accounting education research in order to describe a process of education activity based on what occurs in the field as further study material to find out the shortage and the weakness of accounting education program so that those can be required to improve the curriculum and to adapt to the world of work today. The conclusion which is gained in this research states that the curriculum of bachelor degree's accounting study program at faculty of economics Wijaya Putra University, faculty of economics Darma Cendika Catholic university and faculty of economics merdeka university, implementation of KBK's continuance requires much more gradually and continually improvement. While faculty of business widya mandala

¹ *Acknowledgment:* Penelitian ini didanai dari Hibah Dosen Pemula Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

catholic university and Indonesia school of economics (STIESIA) have applied competency-based curriculum even though there is still much that needs to be improved gradually and continually so as to produce the quality of the college itself and the quality of graduates.

Keywords: *competency-based curriculum, education quality*

PENDAHULUAN

Pengembangan SDM yang bermutu dan berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan daya saing bangsa di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Daya saing dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas program studi. Kualitas yang baik dan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dapat dilakukan oleh program studi yang sekaligus sebagai jawaban terhadap persyaratan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi. Pendidikan bermutu merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting agar generasi muda Indonesia bisa *survive* dalam persaingan global.

Pendidikan tinggi bidang akuntansi sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pembentukan profesi akuntan melalui serangkaian proses belajar mengajar, merupakan titik utama yang perlu diperhatikan dalam upaya menghasilkan calon profesional akuntansi dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (*plan*) yang dibuat seseorang atau sebagai kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa. Kurikulum juga merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan tinggi yang harus dirancang sebaik-baiknya demi kepentingan lulusan dalam meniti karir di masyarakat. Kurikulum sebagai suatu perangkat isi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus bersifat dinamis, oleh karena itu secara berkala perlu diadakan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KBK dituntut untuk dapat bekerja sama antara bidang pendidikan dengan lingkungan luar khusus nya perusahaan atau dunia kerja, terutama dalam

mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik, sehingga menghasilkan hubungan antar peserta (mahasiswa) dengan kondisi dan kenyataan yang ada di perusahaan dimana peserta didik memiliki kemampuan, kreatifitas, akuntabilitas dan terbentuknya *softskill* yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

Dengan keberlanjutan penerapan KBK pada setiap perguruan tinggi harapannya mampu menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam kurikulum program studi akuntansi sehingga mutu lulusan akuntansi dapat bisa dipertanggungjawabkan dan di tingkatkan secara terus-menerus. Kelemahan tidak hanya berasal dari kurikulum namun *link and match* antara dunia pendidikan (kurikulum dan proses pembelajaran) dan kebutuhan dunia kerja (*stakeholder*) masih sangat kurang sehingga perlu perhatian khusus. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunan kurikulum tidak melibatkan *stakeholder* dan profesi akuntansi melainkan di susun oleh para akademisi yang tidak mengikuti perkembangan di dunia kerja saat ini, untuk itu peran dari *stakeholder*, profesi akuntansi dan akademisi sangatlah diperlukan dalam menyusun kurikulum agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Tujuan dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui proses perkembangan dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi pada pendidikan akuntansi pada perguruan tinggi di surabaya. Untuk mengetahui keberlanjutan kurikulum berbasis kompetensi di pendidikan akuntansi. Untuk menyempurnakan kurikulum berbasis kompetensi serta menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Tujuan yang ingin di capai untuk menindaklanjuti keberlanjutan kurikulum berbasis kompetensi pada program studi akuntansi di perguruan tinggi swasta di Surabaya dan sebagai bahan diskusi kepada Dinas Pendidikan Tinggi untuk mengevaluasi kurikulum berbasis kompetensi sampai dengan outputnya agar mutu lulusan di setiap perguruan tinggi siap bersaing di dunia kerja. Permasalahan yang ada bagaimana keberlanjutan penerapan kurikulum berbasis kompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan akuntansi di Surabaya. Lingkup penelitian dalam bidang pendidikan banyak lebih diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian dalam bidang pendidikan dilakukan untuk

mengevaluasi pelaksanaan atau keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan suatu sistem, program, model, metode, instrumen, media dan sebagainya. Dalam penelitian pendidikan terdapat penelitian segi ilmu dan praktik pendidikan, ilmu dan praktik kurikulum dan praktik pembelajaran, ilmu dan praktik bimbingan dan konseling serta ilmu dan praktik manajemen pendidikan.

TINJAUAN TEORITIS

Berbagai institusi dan organisasi profesi juga telah memfasilitasi karyawannya agar dapat bekerja secara team. Disinilah peran tenaga pendidik untuk memfasilitasi tumbuhnya kompetensi sejak dini melalui penugasan-penugasan dalam ruang kelas yang proses penyelesaiannya oleh mahasiswa yang didesain khusus oleh dosen. Sehingga hasil akhir tercapainya tujuan proses kompetensi yang dilakukan kepada mahasiswa harapannya dapat mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, nilai, sikap minat peserta (mahasiswa) agar mereka dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran disertai tanggungjawab (Sanjaya, 2006: 71).

Dosen juga dituntut untuk dapat mengkondisikan lingkungan belajar yang menyenangkan agar dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua peserta didik sehingga menumbuhkan minat belajar dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Trianto (2007) menunjukkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para pesertanya untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Suryosubroto (2004) dalam Maharding (2010: 12) sarana pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk mempertinggi keefektifan dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Mutu sebuah lembaga pendidikan dikatakan baik dapat diukur dari fasilitas (sarana dan prasarana) yang dimiliki, sebab fasilitas sangat menentukan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung.

Standar penilaian pendidikan atau pembelajaran menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menyatakan penilaian merupakan proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil pembelajaran dapat berupa ulangan dan ujian. Penilaian dilakukan oleh tenaga pendidik untuk membantu proses pembelajaran, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Penilaian juga memberikan umpan balik kepada tenaga pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

Mutu pendidikan tinggi dipahami sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dikelola sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan jasa kependidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan atau pengguna (Tampubolon, 2001: 74). Sedangkan pendapat dari Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh dalam wawancaranya di Liputan 6 (2010) mengatakan bahwa perguruan tinggi saat ini dituntut mampu membangun pola pikir di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Dalam dunia pendidikan, *stakeholder* sangatlah berperan dalam mendukung kompetensi lulusan yang telah dipersiapkan untuk memegang kendali di dunia pasar. Pendidikan sekolah dalam menjalankan pengelolaannya mampu memberdayakan dan bekerja sama dengan *stakeholder* (*pemangku kepentingan*) (Ledo, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan secara bertahap yaitu yang pertama kali dilakukan adalah merencanakan perguruan tinggi yang dijadikan sasaran untuk melakukan penelitian, *kedua* menentukan point-point yang akan digali guna mendapatkan informasi yang baik, *ketiga* survey awal pada obyek yang akan di teliti dengan melibatkan ketua program studi, dimana akan menentukan siapa saja yang akan di gali yang berawal dari dosen, mahasiswa serta *stakeholder*. Penelitian ini di gunakan penelitian *deskriptif kualitatif* dengan studi kasus, dimana peneliti terlibat langsung di dalam sebuah proses pengambilan data dan tidak ada penekanan terhadap individu tersebut. Namun secara keseluruhan berkaitan dengan KBK, mulai dari standar kompetensi lulusan, struktur kurikulum, penyusunan materi pembelajaran, penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, peran

dosen dalam menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada *Student Centered Learning* atau SCL, penilaian hasil pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran. Pengambilan data melalui obyek penelitian berupa survey, wawancara dan dokumentasi dengan ketua program studi, dosen akuntansi, dan mahasiswa akuntansi, serta analisa dokumen yang terkait. Di 5 (lima) perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, B dan C antara lain (UWM, STIESIA, UKDC, UWP dan UNMER). Dalam pengambilan data tersebut terdapat beberapa pertanyaan (*research question*) yang akan dijawab sesuai dengan kebiasaan, kondisi dan kenyataan yang ada di perguruan tinggi tersebut.

ANALISIS dan PEMBAHASAN

Penetapan Kompetensi Lulusan

Pemberlakuan penerapan KBK pada perguruan tinggi telah mengikuti aturan dari Mendiknas, walaupun pada tahun pemberlakuan KBK tidak serentak. Dan sampai saat ini pun perbaikan-perbaikan dapat terus berlangsung bagi setiap perguruan tinggi guna menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang akuntansi. Seperti pendapat (Hasibuan, 2010: 17) menyatakan bahwa tidak mudah untuk merubah peraturan yang baru diterapkan di perguruan tinggi secara langsung, perlu proses dan waktu agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sosialisasi, pertemuan-pertemuan di kalangan tenaga kependidikan atas inovasi kurikulum baru tersebut.

Perubahan kurikulum mengikut sertakan *stakeholder* dalam menambah kompetensi lulusan dalam proses belajar mengajar, berbagai cara yang sudah dilakukan dalam memberikan masukan kebutuhan atas kompetensi lulusan sehingga dapat menambah tatanan kurikulum yang baik di setiap perguruan tinggi swasta. Hal yang senada di sampaikan oleh Bima Putra (*Consultan Pajak*) bahwa dukungan dalam memberikan mutu pendidikan bermuara dari kurikulum serta kompetensi tenaga pengajar itu sendiri juga diperlukan. Hasibuan (2010: 130) menyatakan untuk mendapatkan konstruksi kurikulum yang lebih, dapat memenuhi harapan banyak pihak terutama dari sisi “peserta didik dan *stakeholders*”.

Struktur Kurikulum

Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas beberapa kelompok mata kuliah yang terdiri dari Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran/mata kuliah yang di berikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan di berikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Dalam menyusun perangkat mata kuliah disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Hal yang dicapai dalam proses pembelajaran tidak hanya dari ketiga aspek (pengetahuan, keterampilan dan sikap/nilai) namun kesiapan, kemandirian dan ketahanan mental (mental yang tangguh) diperlukan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik. Tugas program studi meramu kurikulum dengan kerja praktek dan magang sangat diperlukan sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga lulusan dari perguruan tinggi sudah dibekali dengan kompetensi keilmuan dibidangnya dan siap kerja dengan keterampilan yang telah dimilikinya sehingga dapat mengurangi angka lulusan yang menganggur. Alamsjah (2011) menjelaskan bahwa fungsi pendidikan bukanlah hanya mencetak lulusan yang berkualitas, tetapi juga harus mampu menciptakan pakar yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebab, untuk terjun ke dunia kerja, maka yang menjadi *customer* adalah perusahaan. Oleh karena itu, institusi penyelenggara pendidikan tinggi perlu memahami apa yang diperlukan perusahaan, setelah itu barulah menyesuaikan konsep dengan metode pendidikannya.

Terlebih lagi aspek-aspek yang berproses di dalam proses pembelajaran disetiap mata kuliah ikut berperan didalamnya. Seperti ungkapan Bloom (1956) dalam pernyataannya menyatakan bahwa tujuan pendidikan terdiri dari 3 bagian antara lain pertama, ranah *koqnitif* yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian dan keterampilan

berpikir; Kedua ranah *afektif* berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi dan cara menyesuaikan diri; ketiga ranah *psikomotor* berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang dan mengoperasikan komputer.

Penyusunan Materi Pembelajaran

Agar pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi lulusan yang kompeten, utuh sebagai manusia dan memiliki kapabilitas untuk belajar berkelanjutan, maka diperlukan suatu materi pembelajaran yang dibangun dengan tiga komponen yaitu aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap/nilai. Tidak lepas dari kompetensi dari tenaga pengajar itu sendiri, pembelajaran yang baik untuk para peserta didik berawal dari kesiapan tenaga pendidik dalam memahami, menguasai materi dan pemahaman materi yang diterima oleh peserta didik, kondisi pembelajaran sekarang ini peserta didik diuntut untuk belajar secara individual serta memecahkan permasalahan yang diberikan oleh tenaga pendidik dengan melakukan kegiatan di lapangan (tugas lapangan). Secara keseluruhan penyusunan materi pembelajaran dapat di kelola, dan dibuat semenarik mungkin dalam proses belajar mengajar oleh masing-masing tenaga pendidik. Tidak hanya menarik namun komposisi yang seharusnya di berikan baik dalam aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek nilai atau sikap telah berproses didalamnya.

Didalam merumuskan dan menerapkan proses pembelajaran yang baik antara tenaga pendidik atau dosen dan mahasiswa sebagai sasaran dalam proses pembelajaran yang dapat menghasilkan mahasiswa yang berkompeten di bidangnya diperlukan kegigihan, keseriusan, ketelatenan, inovatif, kreatif dari tenaga pendidik untuk menggodok materi pembelajaran yang terdiri dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek nilai atau sikap, seperti pernyataan yang dikutip dari (Trianto, 2007: 16) menunjukkan bahwa proses belajar terjadi di banyak cara baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan berlangsung di sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan diri pembelajar. Perubahan

itu berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kebiasaan baru yang diperoleh individu, serta pengalaman merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan sebagai lingkungan belajarnya. Kesimpulannya bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri.

Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jika semua hal tersebut dapat dipaparkan dengan baik dan semua dapat menggunakannya akan lebih mudah dalam proses pembelajaran, lebih terarah dan dapat terukur keberhasilan/ketercapaiannya dan sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud adalah materi-materi pembelajaran yang sudah tertuang dalam silabus atau SAP yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan proses pembelajaran, materi yang tertuang dalam silabus telah disampaikan, tercapainya tingkat kompetensi (materi) yang harus dikuasai dan dipahami oleh mahasiswa, demikian juga dengan target waktu yang direncanakan per materi setiap pertemuan yang tertuang dalam silabus atau SAP yang ditargetkan sesuai/terpenuhi antara waktu dan kenyataannya.

Kompetensi sudah menjadi bagian dari pembuatan silabus, metode pembelajaran, GBPP, kontrak perkuliahan dan sebagainya. Oleh karena itu para tenaga pendidik atau dosen diwajibkan dan diharuskan untuk membuat silabus, GBPP, kontrak perkuliahan dan SAP untuk menentukan arah output dari mahasiswa itu sendiri serta kompetensi yang diperoleh para lulusan serta dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Seperti yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi A dan B bahwa mutu dan kompetensi dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan keterbukaan dosen dalam menyampaikan silabus dan tingkat kesesuaian antara materi pembelajaran

dan pemahaman dalam setiap materi pembelajaran selama proses belajar mengajar berlangsung.

Merefleksikan yang sudah dilakukan oleh para tenaga pendidik merupakan sebuah fenomena di bidang pendidikan bahwa tenaga pendidik enggan memberikan silabus, SAP, GBPP dan/atau kontrak perkuliahan diartikan bahwa sungguh sangat menyedihkan bagaimana proses pembelajaran dikelas tanpa adanya kontrak perkuliahan, bagaimana kompetensi tenaga pendidik itu sendiri, bagaimana peran program studi secara keseluruhan proses pembelajaran yang baik di bidangnya. Dukungan pernyataan berasal dari Sajidan (2011) bahwa pengembangan profesionalisme dosen guna menunjang penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak hanya bergantung pada kualitas tempat pendidikan yang pernah ditempuhnya. Pengembangan dan profesionalisme dosen sesungguhnya terletak pada kemauan dan kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya ketika mereka sudah menduduki jabatan dosen.

Penyusunan Rencana Pembelajaran Berupa Silabus dan SAP serta Unsur-Unsur didalamnya

Untuk mengetahui apakah program studi akuntansi sudah menyusun suatu rencana pembelajaran berupa Silabus dan SAP serta unsur-unsur yang ada didalamnya (termasuk Indikator hasil belajar, rencana waktu, evaluasi hasil belajar, materi pelajaran, serta kompetensi) sama halnya pernyataan Furchan et al. (2005: 99) menyatakan bahwa: silabus yang bagus terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur dimaksud meliputi kompetensi dasar, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pembelajaran, skenario pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. Sedangkan pernyataan Mulyasa (2007: 191) menyatakan bahwa keleluasaan dan kebebasan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Maka perlunya dan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus antara lain ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, serta efektif dan efisien.

Penyusunan silabus dan SAP yang didalamnya terdapat unsur-unsur kompetensi dasar, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pembelajaran,

skenario pembelajaran, sumber belajar dan penilaian, dimana program studi dan atau universitas seharusnya mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi proses belajar mengajar termasuk kepedulian akan kompetensi dosen itu sendiri dalam mengembangkan kompetensinya menjadi berbobot, baik dari segi keilmuannya maupun wawasan dalam bidang studi yang diembannya saat ini.

Relevansi dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kebutuhan akan pendidikan khususnya perguruan tinggi memiliki keterkaitan dan kesepadanan (*Link and Match*) dengan dunia kerja dianggap sangat ideal. Jadi ada keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaanya. Menjalankan *Link and Match* bukan merupakan hal yang sederhana, dibutuhkan kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut. Seharusnya perguruan tinggi mulai menjadikan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah di kampusnya.

Relevansi *link* dan *match* dengan dunia kerja dapat di tingkatkan lebih baik lagi sehingga proses pembelajaran lebih dapat mengetahui kondisi kenyataan di lapangan. Menurut peneliti, relevansi *link* dan *match* dengan dunia kerja dalam proses pembelajaran sangat di butuhkan di pendidikan tinggi tidak hanya memberikan contoh kasus, namun yang lebih di tingkatkan lagi adalah bagaimana mahasiswa melakukan dan menangani serta terlibat langsung dengan kasus-kasus di lapangan. Dan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan meningkatkan etos kerja yang baik bagi calon lulusan serta menambah pemahaman akan materi pembelajaran. Menurut Mulyasa (2007: 192) menyebutkan bahwa kesesuaian atau keserasian antara silabus dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat pemakai lulusan. Lulusan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dilapangan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kesesuaian antara silabus yang dikembangkan dengan komponen-komponen kurikulum secara keseluruhan termasuk didalamnya standar kompetensi, standar isi, standar proses dan standar penilaian. Serta kesesuaian silabus dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.

Pencapaian Target Belajar dalam Silabus

Pencapaian target pembahasan terhadap materi pembelajaran serta hal-hal yang disampaikan sampai dengan akhir semester perlu tenaga pendidik kaji dan evaluasi kembali agar pencapaian yang diharapkan melalui proses belajar mengajar dapat di serap oleh peserta didik. Pada proses pembelajaran yang tingkat penyampaian materinya kurang masih di perlukan tindakan tegas dari pihak manajemen (universitas) dalam meningkatkan mutu pada tingkat kedisiplinan. Dan akan mempengaruhi penyampaian materi dari setiap pertemuan, sehingga dapat di pertanyakan mutu lulusan dari universitas tersebut. Silabus, GBPP, SAP dan kontrak perkuliahan sangat diperlukan dalam menilai ketercapaian dan kesesuaian permateri dengan melakukan dokumentasi terhadap berita acara pelaksanaan perkuliahan yang didalamnya terdapat tanda tangan atau paraf mahasiswa dalam menilai tingkat kesesuaian dan target belajar di setiap pertemuan dan di evaluasi secara berkala oleh Badan Penjaminan Mutu di Internal Perguruan Tinggi.

Tingkat penyampaian materi dari pernyataan yang ada perlu adanya kesesuaian atau relevansi antara penyampaian materi dari dosen dengan silabus yang digunakan, sehingga apa yang telah dicapai pada setiap pertemuan berupa kompetensi dasar dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pedoman atau acuan dalam setiap pertemuan. Refleksi pencapaian target belajar dalam silabus diperlukan adanya keseriusan bagi dosen untuk menilai dan mengelola silabus disesuaikan dengan materi yang diajarkan setiap minggunya sehingga kompetensi dan target materi yang akan diajarkan sesuai dengan silabus yang telah dipersiapkan.

Tingkat Kedisiplinan Tenaga Pendidik

Disiplin tidak lagi merupakan suatu yang datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu, akan tetapi disiplin merupakan aturan yang datang dari dalam dirinya sebagai suatu hal yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin diri sendiri hanya akan tumbuh dalam suatu suasana dimana antara guru dan para peserta didik terjalin sikap persahabatan yang berakar dari rasa

saling menghormati dan saling mempercayai (Rohani, 1990: 134). Tidak hanya disiplin yang di butuhkan tenaga pendidik namun pendidikan di mulai dari tanggungjawab seperti yang di kutip waidi dalam Santi (2010: 17) mengatakan bahwa salah satu keberhasilan mendidik siswa adalah dengan cara memberinya tanggungjawab. Tanggungjawab merupakan indikator penting bahwa seseorang memiliki nilai lebih dimana kualitas merupakan dambaan banyak orang. Sama halnya pendapat Soedarsono dalam Santi (2010: 17) menunjukkan bahwa tanggungjawab merupakan hal yang sangat urgent dalam pembentukan watak seseorang.

Penilaian dari peserta didik terhadap kedisiplinan tenaga pengajar/dosen di lingkungan masing-masing mengungkapkan bahwa tenaga pengajar/dosen dapat dikatakan disiplin dalam ketepatan waktu. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada program studi terakreditasi C bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik yang masih sangat kurang, banyak diantaranya keterlambatan lebih dari 30 menit atau lebih sesuai jam yang telah ditentukan, dan peserta didik melakukan itu tidak hanya sekali, namun dilakukan setiap hari dan peran tenaga pengajar atau dosen akhirnya tidak berperan penting dalam mendisiplinkan dan menasehati peserta didik. Sejauh ini tidak ada tindakan tegas atau peringatan kepada para peserta didik untuk memberi pelajaran akan kedisiplinan. Pendapat Asmani (2011: 102) menyatakan bahwa disiplin merupakan simbol konsistensi dan komitmen seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal. Sehingga dalam keadaan apapun, ia tetap menjadi figur teladan yang layak dicontoh orang lain. Kedisiplinan menjadi suatu keniscayaan baginya untuk melahirkan anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Namun tidak hanya peserta didik saja yang melakukan tidak kedisiplinan dalam proses belajar mengajar tenaga pengajar pun tidak luput dari ketidakdisiplinan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa dosen yang tidak disiplin, namun masih di berikan toleransi bagi dosen yang terlambat, bisa dikarenakan pada saat mau ngajar kendaraan bermotor rusak, macet, melakukan perjalanan dinas dan sebagainya.

Dalam merefleksikan kegiatan dosen dalam tingkat kedisiplinan dapat dinilai sebagai dosen yang profesional dari segi waktu, hal ini akan mendukung kehidupan pribadi profesionalitas dosen tersebut dalam proses belajar mengajar serta membimbing mahasiswa agar selalu tepat waktu pada saat mulai perkuliahan maupun akhir pertemuan. Serta dapat menciptakan suatu kebiasaan yang baik dalam mendisiplinkan waktu dalam berkehidupan dan bermasyarakat.

Peran Dosen dalam Menerapkan Metode Pembelajaran yang Berpusat Pada Aktivitas Belajar Mahasiswa (SCL)

Tugas pokok dosen adalah mendidik, mengajar, melatih dan mempunyai sikap profesional yang merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar, namun tugas dosen dalam SCL tidak hanya diuntut berkemampuan mengajar saja namun juga mempunyai kemampuan memfasilitasi kebutuhan/kesulitan belajar mahasiswa, memotivasi mahasiswa, menjadi inspirator utama dan sekaligus menjadi evaluator yang jujur, terbuka dan berkeadilan. Dengan demikian timbulah persahabatan yang unik antara tenaga pendidik dan peserta didik. Tenaga pendidik menjadi sahabat tempat bertanya, teman diskusi dan mencurahkan seluruh gagasan dan pengetahuan serta kompetensi peserta didik tanpa rasa takut atau canggung (Asihono, 2004: 55).

SCL diperlukan karena konsekuensi penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), proses pembelajaran yang sesuai dengan SCL, yang juga diperlukan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi dan lingkungan, yang menyebabkan informasi dalam buku teks dan artikel-artikel yang ditulis lebih cepat kadaluarsa. Selain itu dilapangan pekerjaan (dunia kerja) membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan baik, yang mampu bekerja sama dengan tim, memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif, mampu memproses dan memanfaatkan informasi, serta mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pasar global, dalam rangka meningkatkan produktifitas. Oleh sebab itu, proses pembelajaran harus difokuskan pada pemberdayaan dan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai.

Mahasiswa merupakan subyek pembelajaran, yang perlu diarahkan untuk belajar secara aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya dengan cara bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak terkait.

Metode Pembelajaran

Di bagian ini lebih fokus untuk mengetahui apakah dosen program studi akuntansi sudah menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*) dalam proses pembelajaran. Dosen mempunyai tugas utama yaitu menyelenggarakan pengajaran dalam arti seluas-luasnya, yaitu pengajaran sebagai pelaksanaan pendidikan dalam maknanya yang utuh. Disamping itu dosen juga masih dibebani peran sebagai ilmuwan, administrasi maupun sebagai penasihat akademik. Mahasiswa saat ini semakin kritis dengan kemajuan teknologi informasi yang membuat mahasiswa berani mengemukakan pendapatnya. Untuk itu tugas dan tanggungjawab seorang dosen semakin besar, sehingga dosen dituntut untuk mempunyai kemampuan dan keterampilan serta kreatifitas yang cukup tinggi.

Tujuan utama mengajar adalah membelajarkan para mahasiswa. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses belajar mengajar tidak dapat diukur dari sejauh mana peserta didik telah menguasai materi pelajaran, tetapi diukur dari sejauh mana peran peserta didik melakukan proses belajar mengajar. Sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang diprioritaskan karena peran dosen sudah bukan lagi menguasai dikelas yang kesemuanya diatur dan di batasi oleh kemauan dosen melainkan mahasiswa ditempatkan sebagai subyek yang belajar sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga pembelajar memiliki tanggungjawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama keterlibatan aktif dan partisipasi mahasiswa. Dan hasil yang di harapkan hubungan antar mahasiswa yang satu dengan yang lainnya adalah setara, yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas belajar. Dari pengalaman praktek yang ada, diharapkan setelah mengalami pembelajaran dengan pendekatan SCL pembelajar akan melihat dirinya secara berbeda, dalam arti lebih memahami manfaat belajar, lebih dapat menerapkan

pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dan lebih percaya diri (O’Niell & McHahon, 2005) dalam Nugraheni (2007: 2).

Sikap Dosen dalam Penerapan KBK

Dalam proses belajar mengajar yang efektif, dosen semestinya harus dipandang sebagai seorang manager kuliah dan merupakan nara sumber proses belajar. Dosen bertindak sebagai *director, facilitator, motivator dan evaluator proses belajar*. Dengan sumber pengetahuan utama adalah buku, perpustakaan, artikel dalam majalah, hasil penelitian, dan media cetak. Dosen menetapkan sumber pengetahuan yang harus dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa dalam bentuk silabus atau proses belajar, mahasiswa menjalani proses belajar tersebut dibawah pengendalian dosen.

Dukungan atas program pemerintah dari ketua program studi dan dosen sangat diharapkan dan pantas mendapatkan apresiasi dari kalangan pendidik, hanya saja perlunya perbaikan-perbaikan yang menyoroti akan kompetensi dosen itu sendiri dalam menguasai bidang ilmunya. KBK sejauh ini dapat dijadikan sebagai sebuah rel atau jalur pada tingkat pendidikan dan menjadi sebuah bagian yang berjalan beriringan dalam menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi warga negara indonesia seutuhnya. Namun sejauh mana akan keberlanjutan penerapan KBK ini pada perguruan tinggi, perlu adanya evaluasi yang mendalam dalam meramu kurikulum yang lebih baik dan mencerminkan kompetensi pendidikan khususnya bangsa Indonesia ini.

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan KBK sebagai upaya untuk mensukseskan implementasi KBK agar membuahkan hasil yang diharapkan dan melalui KBK, yang berkemampuan mengintegrasikan *intelektual skill, knowledge* dan aktif dalam sebuah perilaku secara utuh. Seperti dari ungkapan Suwardjono (2005: 10) bahwa kemandirian belajar harus dimulai sejak pertama kali mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Disamping itu mahasiswa harus punya keyakinan bahwa dosen bukan merupakan sumber pengetahuan utama. Sumber pengetahuan utama tersedia di perpustakaan dan di media cetak atau

audio visual lainnya termasuk internet. Sikap dan perilaku mandiri merupakan sikap yang sengaja dibentuk dan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya.

Dari pemaparan dan ungkapan yang berasal dari mahasiswa bahwa pelayanan dosen kepada mahasiswa khususnya dosen tetap pada masing-masing program studi lebih mudah untuk di temui dari pada dosen LB (tidak tetap), penilaian dari mahasiswa terhadap dosen kebanyakan sikap dosen lebih terbuka dalam pengembangan ilmu yang di tekuni. Dan yang berkaitan dengan pelayanan dosen untuk bimbingan skripsi diserahkan dan ditentukan semuanya oleh program studi. Konsultasi yang dilakukan dosen dan mahasiswa berkaitan dengan materi kuliah termasuk penugasan dapat diatur oleh mahasiswa dan dosen, baik setelah selesai perkuliahan berlangsung maupun membuat janji pada saat hari yang lain. Sehingga akan tercipta proses pembinaan dengan mahasiswa dalam bentuk konsultasi dan tidak ada rasa segan yang terjadi antara mahasiswa dan dosen serta kedekatan dalam pembinaan proses konsultasi penugasan yang menurut mahasiswa tidak jelas.

Peningkatan Wawasan dan Ilmu Pengetahuan Dosen

Peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan dosen dapat di jadikan sebagai sumber ilmu/*transfer knowledge* dari program-program yang diadakan oleh pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari pihak instansi pemerintahan maupun dari instansi swasta. Informasi yang didapat oleh ketua program studi berkaitan dengan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi dosen dapat diketahui bahwa peran ketua program studi dalam memberikan informasi berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan berupa seminar, workshop, kepada dosen sangatlah diharapkan dan sangat penting dan merupakan investasi keilmuan bagi para tenaga pendidik/dosen sesuai dengan ilmunya. Sejauh ini tidak semua dosen diikutkan dalam kegaitan seminar, simposium, workshop, pelatihan dan sebagainya. Berbagai pertimbangan dalam mengikut sertakan seluruh dosen mengikuti kegiatan peningkatan wawasan dosen, di sebabkan dana yang dimiliki yang masih sangat kurang biasanya dialami oleh program studi terakreditasi C. Ini merupakan permasalahan yang begitu besar dalam peningkatan wawasan

keilmuan dosen, khususnya program studi terakreditasi C. Namun berbagai perguruan tinggi yang telah terakreditasi A dan yang mempunyai anggaran lebih untuk mengundang dosen (terakreditasi C) dalam meningkatkan mutu, menambah wawasan agar lebih luas dari keilmuannya dan dapat dimaklumi akan ketersediaan fasilitas dan anggaran yang dimiliki. Dengan kondisi yang semakin berkembang mau tidak mau dosen harus merubah perannya yang dulunya di takuti saat ini di segani dan melayani dengan bermitra dengan mahasiswa agar penyampaian materi, pemahaman dan suasana belajar di kelas berlangsung santai tapi serius.

Sarana dan Prasarana Pendukung Proses Pembelajaran

Pada kondisi saat ini sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Termasuk teknologi, fasilitas, perpustakaan dsb. Berbagai jenis teknologi khususnya teknologi yang didukung oleh komputer telah merubah cara hidup manusia khususnya dalam belajar mengajar. Namun tidak semua sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung dalam proses pembelajaran digunakan sebagai fasilitas. Pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat menuntut dosen agar mengikuti perkembangan teknologi baik dalam penggunaan laptop, LCD proyektor, *e-learning*, fasilitas internet, dsb..., dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi yang usang sudah ditinggalkan demi efektifitas dan efisiensi dalam persiapan proses belajar mengajar mis: OHP.

Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar dalam proses pembelajaran berfungsi untuk menetapkan kompetensi dari peserta didik tahap demi tahap. Penilaian dilakukan dengan memverifikasi terhadap bukti-bukti hasil belajar selama proses pembelajaran berlangsung dan komponen nilai bersifat menyeluruh yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap/nilai. Penilaian dosen secara menyeluruh terdapat dari aktivitas dikelas setiap pertemuan, baik dari tugas, aktif bertanya, diskusi, tugas kelompok, yang telah di sampaikan pada pertemuan pertama atau pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian dosen telah diatur secara tersendiri

berkaitan dengan prosentasi penilaian yang wajib mahasiswa penuhi. Dari penilaian secara keseluruhan bahwa dosen menilai sesuai dengan apa yang mahasiswa penuhi berupa tugas-tugas. Untuk itu perlunya keterbukaan dengan mahasiswa berkaitan dengan nilai pada proses pembelajaran dikelas. Aqib dan Rohmanto (2007: 128) menyatakan bahwa penilaian mengedepankan beberapa hal antara lain berorientasi pada kompetensi, valid, adil, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, bermakna dan mendidik.

Penilaian dosen akan lebih baik lagi apabila dilakukan dengan adil, terbuka, mempunyai makna, dan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam proses belajar mengajar berlangsung. Dosen akan mengetahui mahasiswa yang aktif di kelas sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam berinteraksi dengan bahan ajar serta pengumpulan tugas yang telah dipahami dengan sekuat tenaga agar apa yang dimaksudkan dosen dapat sesuai dengan hasil yang dicapai mahasiswa.

Evaluasi Proses Pembelajaran

Evaluasi berguna untuk menguji tingkat pemahaman materi pada setiap pertemuan maupun tes akhir dalam proses belajar mengajar. Karena itu evaluasi tidak dapat dipisahkan dari belajar dan mengajar. Seperti yang dikutip dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 yang menyatakan bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi tidak hanya diperlukan oleh peserta didik/mahasiswa namun evaluasi juga dilakukan untuk kinerja dosen dalam proses belajar mengajar. Evaluasi akan berlangsung dalam jangka waktu panjang atau terus menerus untuk menentukan tingkat kemajuan pengajaran sehingga memperoleh umpan balik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar. Penilaian bersifat *evaluatif formatif* yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek.

Kualitas pengajaran dan standar akademik perlu untuk selalu dievaluasi dan ditingkatkan karena pendidikan tinggi merupakan kegiatan yang mahal.

Pengajaran yang baik merupakan hal yang rumit, sangat individual, berkaitan dengan materi. Pada kenyataannya, evaluasi kinerja dosen kadang tidak efektif karena evaluasi dosen sekedar menjadi kegiatan administratif, tidak ada umpan balik, terlalu dikaitkan dengan hukuman dan imbalan *ekstrinsik* yang justru menurunkan motivasi dosen untuk mengajar yang baik. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai sebuah tugas dari para manajemen (universitas) dalam menindaklanjuti kualitas pengajaran pada setiap pertemuan sampai pada akhir pertemuan atau sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).

Kualitas dosen yang baik tidak hanya dari segi pengajaran namun dukungan dari pihak manajemen memfasilitasi, mengembangkan dan memproses dosen dengan banyak kegiatan yang menghasilkan kompetensi. Mutu dari dosen juga dapat di pertanggungjawabkan secara individu melalui *sertifikasi* dosen yang akhir-akhir ini dinas pendidikan nasional sedang gencar untuk meningkatkan mutu dosen sebagai dasar kompetensi agar menjadi semakin baik.

Tes Awal, Tes Akhir dan Indeks Prestasi

Perlunya evaluasi awal guna membandingkan pemahaman awal sebelum kuliah berlangsung yang disebut *pre-test* (test awal) dan hasil *post test* (test akhir) bagi mahasiswa guna lebih memantapkan materi yang akan dan telah di ajarkan. *Pre test* dan *post test* merupakan test atas pemahaman peserta didik terhadap mata kuliah yang akan di bahas pada awal pertemuan maupun pada akhir semester (UAS) selama satu semester ke depan. Pada umumnya *pre test* dilakukan pada awal pertemuan untuk membandingkan dengan *post test* dengan tingkat kepahaman secara keseluruhan dan kemajuan peserta didik atas proses pembelajaran yang di tempuhnya. *Pre test* dapat dilakukan dengan bertanya langsung ke mahasiswa maupun dengan menggunakan alat tulis untuk menjawab serta tergantung kreasi dosen dalam bertanya.

Indeks prestasi (IP) merupakan penilaian mahasiswa yang dinyatakan dengan nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program studi. Berdasarkan pengamatan bahwa tingkat pemahaman berdasarkan tugas-tugas yang diberikan,

materi/bahan ajar dan perolehan indeks prestasi secara keseluruhan berdasarkan kemampuan mahasiswa itu sendiri bagaimana mahasiswa itu berinteraksi dengan proses pembelajaran dikelas.

Kualitas dosen dari pengamatan yang ada bahwa tingkat kedisiplinan menyerahkan soal ujian dan mengembalikan nilai ujian sangat disiplin, berkat peran dari ketua program studi yang tekun untuk mengingatkan kepada dosen untuk segera menyerahkan soal dan mengembalikan nilai pada saat setelah ujian pada tanggal yang telah ditentukan. Namun pada program studi akuntansi terakreditasi C masih belum nampak peran penjaminan mutu dalam pengembalian nilai ujian. Kualitas dosen bukan pada tingkat menyerahkan soal tetapi pengembalian nilai, namun tingkat kedisiplinan dosen tersebut sangat diperlukan. Sehingga alur atau sistem yang sudah terprogram dengan baik di perguruan tinggi dapat berjalan dengan standar yang ada. Dan peran dari kedisiplinan bagi setiap dosen menjadikan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang tingkat kedisiplinan dosen dan mahasiswa baik. Kualitas dosen menjadi kekuatan utama bagi perguruan tinggi dalam menciptakan mahasiswa profesional dan proposional dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa. Karena sebaik dan sehebat apapun perguruan tinggi, apabila tidak didukung dengan dosen yang berkualitas, tidak berarti apa-apa. Sehingga kesuksesan sistem pendidikan dinilai dari hasil yang dicapai pada diri mahasiswa dan pengembangan keilmuannya.

Alumni dan Pemakai Lulusan (*stakeholder*)

KBK di tujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa dan negara. Profil lulusan menunjukkan peran lulusan di dalam kehidupannya termasuk dunia kerja. Untuk dapat membentuk profil lulusan yang diinginkan, maka di perlukan dukungan kompetensi *hard skills* dan *soft skills* yang terproses di dalam belajar mengajar. Satu profil lulusan dapat di dukung oleh seperangkat kompetensi yang meliputi *hard skills* dan *soft skills*.

Alumni dan lulusan masih merupakan bagian dari perguruan tinggi tersebut dimana semua mahasiswa yang sukses menjalani masa pendidikan di perguruan

tinggi yang pada akhirnya akan menjadi salah satu alumni. Ikatan alumni mempunyai peran penting yang merupakan wadah untuk membangun kualitas atas perguruan tingginya masing-masing. Ikatan alumni pada perguruan tinggi belum berperan secara maksimal sehingga masukkan/input mengenai perkembangan kurikulum yang berarti belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Nuh (2011) menunjukkan bahwa peran alumni dalam suatu institusi perguruan tinggi dinilai sangat penting, sebab, alumni merupakan salah satu pihak yang bisa memberikan bimbingan terutama bagi mahasiswa yang baru lulus.

Kegiatan alumni dapat dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi berdasarkan tingkat kelulusan dari tahun ketahun untuk mengetahui kompetensi serta kebutuhan *stakeholder*. Diperlukan ketekunan, kerja keras dalam mencari informasi kepada *stakeholder* yang selama ini belum dilaksanakan sehingga masukkan pengembangan kurikulum berdasarkan permintaan pasar tenaga kerja serta ketelibatan alumni dapat dipersiapkan dengan baik dalam mendukung proses belajar mengajar dengan baik di perguruan tinggi. Kompetensi lulusan dapat di nilai berdasarkan masa tunggu lulusan, besarnya gaji pertama, posisi jabatan, relevansi dengan bidang akuntansi, dan sebagai berikut. Kualitas, mutu, kompetensi pada lulusan perguruan tinggi swasta tidaklah sama. Mutu dan kompetensi dapat dinilai berdasarkan kebutuhan akan pasar dan respon atas pasar tenaga kerja dalam memberikan input bagi perguruan tinggi untuk mengikuti kebutuhan lapangan pekerjaan.

Keberlanjutan Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum berbasis kompetensi akan terus berkembang didalam institusi pendidikan tinggi dengan menyesuaikan kebutuhan akan lulusan pada masing-masing perguruan tinggi. Diperlukan inovasi-inovasi dan kreativitas dalam mengelola proses belajar mengajar guna menghasilkan mutu lulusan yang dapat bersaing. Pada program studi akuntansi terakreditasi A, B dan C dalam pengelolaan proses belajar mengajar terdapat perbedaan dalam segi kualitas dosen, kualitas mahasiswa, dana, fasilitas sarana dan prasarana, terutama pada program studi terakreditasi C yang dapat dikatakan jauh tertinggal dalam

meningkatkan kompetensi lulusan. Ini merupakan tugas atau pekerjaan rumah dalam keberlanjutan penerapan Kurikulum Berbasis kompetensi terutama akreditasi C yang diharuskan dan diwajibkan guna bersaing dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Yang harus lebih diperhatikan lagi adalah kualitas mahasiswa dan dana yang dimiliki akan berpengaruh pada perkembangan dan persaingan lulusan antar institusi pendidikan tinggi.

Program studi akuntansi terakreditasi A dan B akan semakin berlomba untuk mendapatkan yang terbaik guna menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya sehingga inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan khususnya akuntansi perlu diketahui dan kembangkan berdasarkan *stakeholder* serta kebutuhan akan pasar tenaga kerja berdasarkan minat dan ketertarikan perusahaan dari lulusan pada perguruan tinggi terakreditasi A dan B sangat tinggi, dibanding dengan lulusan yang terakreditasi C, namun sejauh ini ketertarikan *stakeholder* terhadap lulusan terakreditasi C masih sangat kurang, apalagi perguruan tinggi tersebut tidak pernah didengar oleh masyarakat. Bagaimana bisa mengetahui kompetensi lulusan, sedangkan perguruan tingginya saja tidak tau letaknya atau lokasinya dimana. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri pada program studi akuntansi untuk mengembangkan kompetensi lulusan. Perubahan kurikulum berbasis kompetensi bisa saja dilakukan perubahan pada setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan *stakeholder* pada masing-masing perguruan tinggi, namun akan menjadi permasalahan utama adalah dalam segi administrasinya akan terjadi kekacauan pada sistem kinerja dan tidak efisien dalam segi waktu.

Yang dijadikan sebagai pertanyaan sekarang ini adalah sampai kapan penerapan kurikulum berbasis kompetensi diterapkan pada perguruan tinggi di Indonesia, saatnya diperlukan evaluasi secara menyeluruh dan dibutuhkan keseragaman baik yang terakreditasi A, B dan C berkaitan dengan KBK sehingga mutu pendidikan akuntansi di Indonesia dapat bersaing di dunia internasional dan nasional.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dilapangan dari perguruan tinggi swasta di surabaya yaitu Universitas Katolik Widya Mandala (Terakreditasi A), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) (Terakreditasi B), Universitas Wijaya Putra Surabaya (Terakreditasi C), Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya (Terakreditasi C), dan Universitas Merdeka Surabaya (Terakreditasi C) menunjukkan bahwa kurikulum program studi akuntansi strata 1 (S1) pada masing-masing universitas tersebut sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi hanya saja diperlukan banyak perbaikan dan di butuhkan keseriusan, kreatifitas serta dukungan dana dari pihak-pihak yang terkait (yayasan, donatur. dsb) untuk kelancaran proses belajar mengajar. Di bawah ini merupakan rincian hal-hal yang perlu diperbaiki oleh masing-masing perguruan tinggi yaitu:

1. Cara menetapkan standar kompetensi lulusan.

Berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Swasta Surabaya yang terakreditasi A, B, dan C sangat beragam Universitas Katolik Widya Mandala (Terakreditasi A) penerapannya tahun 2007, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) (Terakreditasi B) tahun 2004, Universitas Wijaya Putra (Terakreditasi C) Tahun 2004, Universitas Katolik Dharma Cendika (Terakreditasi C) Tahun 2010, dan Universitas Merdeka (Terakreditasi C) Tahun 2006. Keterlibatan *Stakeholder*, alumni, para profesi (akuntan publik, akuntan pendidik dan akuntan manajemen), perusahaan dan kalangan pendidik yang merupakan pemberi informasi dalam proses pembuatan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Informasi yang di peroleh masih sebatas informasi mengenai kompetensi pada bidang keahlian dan mata kuliah yang ditawarkan saat itu.

2. Struktur kurikulum

Struktur kurikulum pada perguruan tinggi yang diteliti sudah menerapkan kelompok-kelompok mata kuliah berdasarkan peraturan Mendiknas No. 232/U/2000 yang terdiri dari Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Kelompok Mata

Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Struktur kurikulum yang ada dari pada perguruan tinggi merupakan komponen yang di olah sedemikian rupa oleh masing-masing program studi yang dikelompokkan menurut kelompok mata kuliah berdasarkan kompetensi yang ada. Untuk Universitas Merdeka dalam merubah kurikulum nantinya perlu di tambahkan mata kuliah praktek atau keterampilan misalkan Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pajak dsb, untuk menunjang keterampilan peserta didik dalam bidang akuntansi. Terdapat suatu fenomena dalam menentukan mata kuliah (pilihan) dan mata kuliah (konsentrasi) atas pengelompokan tersebut seperti UKDC terdapat mata kuliah pilihan konsentrasi audit (Audit Manajemen, Laboratorium Auditing dan Seminar Auditing) dan konsentrasi perpajakan (Akuntansi Perpajakan, Laboratorium Perpajakan dan Seminar Perpajakan) dan UWP (mata kuliah konsentrasi akuntansi keuangan dan konsentrasi perpajakan dan terdapat pula mata kuliah pilihan yang terdiri dari M.K Akuntansi Keprilakuan, Perpajakan Internasional, Akuntansi Syariah, Audit Manajemen) serta UNMER (terdapat mata kuliah pilihan Keahlian Berkarya/MKB (Komunikasi Bisnis, Manajemen Biaya, Manajemen Operasional, Kewirausahaan dan Perencanaan Pajak) dan Mata kuliah pilihan perilaku berkarya atau MPB (Seminar Akuntansi), sedangkan pada Universitas Katolik Widya Mandala terdapat konsentrasi Mata Kuliah Perilaku Berkarya terdapat Mata Kuliah Pilihan dengan minat Internal Perusahaan maupun Pilihan Eksternal Perusahaan. Serta Mata Kuliah pilihan berkaitan dengan Berkehidupan Bermasyarakat yang didalamnya terdapat Program Skripsi, Program Non Skripsi (dapat memilih Internal dan Eksternal) dan Magang. Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) terdapat konsentrasi Akuntansi Keuangan, Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Manajemen serta Skripsi yang merupakan mata kuliah wajib diambil dan dilalui guna menghasilkan lulusan yang berkompeten. Dari mata kuliah tersebut peserta didik layak mendapatkan dan menerima ilmu pengetahuan atas materi-materi yang disebutkan diatas sebagai penunjang dalam kompetensi di dunia kerja. Terdapat mata kuliah yang sama namun

berada pada kelompok yang berbeda pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, misalkan akuntansi Sektor Publik di Universitas Wijaya Putra program sarjana S-1 akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandala, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) dan Universitas Katolik Darma Cendika pada program akuntansi masuk kedalam kelompok mata kuliah MKB dan untuk Universitas Merdeka program akuntansi S-1 masuk ke dalam kelompok mata kuliah MPB. Secara keseluruhan dalam meramu kurikulum dan dalam mendistribusikan satu mata kuliah ke dalam kelompok mata kuliah MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB sepenuhnya merupakan wewenang dari program studi dan dapat diartikan bahwa program studi memiliki argumentasi maupun pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam meramu Mata kuliah berdasarkan kelompok elemen dan kompetensi yang berproses tersebut.

3. Penyusunan materi pembelajaran

Penyusunan materi pembelajaran merupakan sebuah proses awal yang akan dilakukan dosen dalam proses belajar mengajar dan merupakan suatu siklus mata rantai yang direncanakan dan dijalankan secara seksama untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, dengan mengkoordinasikan unsur-unsur tujuan, kegiatan belajar mengajar, metode mengajar, media dalam mengajar dan bahan atau materi perkuliahan yang didalamnya terdapat aspek-aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai.

4. Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mendukung proses belajar mengajar

Silabus dan SAP untuk program studi akuntansi S-1 dari ketiga perguruan tinggi Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Merdeka dan Universitas Wijaya Putra, belum mengarah kepada kompetensi menjadi sub-sub kompetensi dan belum banyak dosen yang peduli dan transparan akan silabus, SAP dan kontrak perkuliahan yang seharusnya diberikan dan digunakan sebagai pegangan atau panduan belajar peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar selama satu semester. Pembuatan silabus, SAP dan kontrak perkuliahan tidak hanya sesuai dengan literatur yang digunakan

namun juga di dukung oleh praktek kerja serta yang lebih penting kesesuaian dan relevansi materi dengan kondisi yang sedang dibutuhkan dilapangan baik dari tugas individu atau kelompok serta praktek. Tingkat pemahaman dan keniatan dosen terhadap pembuatan silabus masih sangat kurang dapat di pertanggungjawabkan sehingga proses pembelajaran yang seharusnya menghasilkan kompetensi terhadap mahasiswa yang mandiri dan berdaya guna masih sangat kurang. SAP, silabus dan kontrak perkuliahan yang ada saat ini belum mencantumkan komponen evaluasi kinerja dosen dan tingkat kesesuaian antara materi yang diajar dengan kontrak perkuliahan, silabus dan SAP yang diberikan mahasiswa, walaupun evaluasi sudah dilakukan oleh program studi dengan cara memberikan kuisisioner kepada mahasiswa setiap ujian akhir semester, hanya saja secara pribadi belum dilakukan oleh masing-masing dosen. Perlu adanya evaluasi diri sendiri (dosen) untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya tanpa harus dinilai orang lain. Berbeda dengan Universitas Katolik Widya Mandala dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) pada silabus, SAP dan kontrak perkuliahan sudah tersistem dengan jelas akan manfaat, tujuan dan kesesuaian materi dan keterlibatan oleh mahasiswa dalam penilaian akan kesesuaian materi yang diberikan dengan menandatangani setiap materi perpertemuan. Dan hasilnya pun dirasakan sendiri oleh mahasiswa atas kemampuan yang dimilikinya yang berbekal *hard skills* dan *soft skills*.

5. Peran dosen dalam menerapkan metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

Pada umumnya pada program studi akuntansi S-1 Universitas Katolik Widya Mandala, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Merdeka dan Universitas Wijaya Putra sudah melakukan dan menerapkan metode pembelajaran SCL pada peserta didik untuk lebih aktif seperti mencari dan menggali informasi-informasi yang terkait dengan materi kuliah (kasus, jurnal penelitian, artikel) melalui media internet, serta merangsang kreatifitas mahasiswa melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Dari segi keterampilan dimana peserta didik dilatih untuk

aktif, terampil, mahir dan teliti untuk pembuatan laporan keuangan, dari penelitian ini terdapat kekurangan di kurikulum Universitas merdeka yang tidak ada mata kuliah praktek (laboratorium) sehingga hasil akhir pembelajaran untuk bidang akuntansi tidaklah kompeten tanpa di sertai dengan keterampilan. Dari metode pembelajaran yang di terapkan oleh dosen berupa metode simulasi hanya ada satu dosen yang menerapkan metode simulasi dosen di perusahaan khususnya di Bursa Efek Indonesia, selain teori yang di sampaikan, praktek pun peserta didik langsung berinteraksi di lapangan. Untuk itu program studi dan dosen harus menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk membawa peserta didik melihat kondisi yang ada di perusahaan terkait dengan topik tertentu misalkan magang, studi ekskursi dan menggelar perkuliahan di perusahaan. Di kondisi tertentu peserta didik membutuhkan informasi, ilmu dan praktek di lapangan guna mendukung pemahaman mereka akan materi yang ada. Untuk mendukung proses pembelajaran menggunakan metode SCL pada perguruan tinggi yang diteliti kurang dilengkapi dengan sarana dan prasarana misalkan LCD, OHP, perpustakaan dsb.

6. Penilaian pembelajaran

Penilaian pembelajaran pada program studi S-1 pada Universitas Katolik Widya Mandala, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Wijaya Putra dan Unieversitas Merdeka melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti hasil belajar yang didalamnya meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap/nilai dan dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung yaitu nilai tugas baik individu maupun kelompok, diskusi tanya/jawab, *quiz*, ujian (UTS dan UAS), keaktifan, pembuatan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok dan absensi. Bagi peserta didik yang kehadirannya kurang, keaktifan kurang, tidak pernah kumpulin tugas, dsb akan berpengaruh pada nilai individu pada peserta didik tersebut dan dapat dikatakan bahwa kemampuan dalam tingkat pemahaman materi juga diakui akan kurang, sehingga kompetensi pada mahasiswa tersebut perlu dipertanyakan.

7. Evaluasi Proses Pembelajaran

Pada Program studi S-1 akuntansi pada Universitas Katolik Widya Mandala, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Wijaya Putra dan Unieversitas Merdeka secara keseluruhan dosen belum menerapkan dan mengadakan *pre test* sebagai acuan untuk membandingkan dengan *post test* dalam rangka menilai kemajuan peserta didik diakhir semester (UAS) sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Dari perguruan yang di teliti mengenai evaluasi dosen hanya ada satu universitas tidak melakukan evaluasi dosen yaitu Universitas Merdeka disebabkan sistem yang ada tidak berjalan dengan baik dan tidak ada dukungan dari yayasan dalam melakukan proses pembelajaran. Terdapat perbedaan dan kesamaan dalam blanko evaluasi kinerja dosen selama satu semester yang pada masing-masing perguruan tinggi berbeda pandangan akan evaluasi kinerja dosen, yang kesemuanya akan menentukan penilaian kinerja dosen selama proses pembelajaran berlangsung yang diisi oleh mahasiswa tanpa intervensi apapun dalam mengisi blanko quisioner kinerja dosen di setiap mata kuliah.

8. Alumni dan Stakeholder

Alumni dan *stakeholder* yang berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) telah melakukan berbagai upaya untuk mencari informasi berkaitan dengan alumninya yaitu dengan cara *tracer study*, yang setiap tahunnya mengalami perkembangan dan perbaikan. Selain itu menugaskan mahasiswa baru dalam mencari alumni STIESIA yang tersebar di sekitar Surabaya, adanya temu alumni, penitipan blanko data alumni di BAAK untuk membidik alumni yang akan melegalisir ijazah dan transkrip nilai, dsb. Upaya tersebut diharapkan dapat mengetahui keberadaan alumni-alumni pada perguruan tinggi dan akan dilakukan upaya-upaya lain mengikuti perkembangan kondisi lapangan dan informasi.

Pada Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Wijaya Putra dan Universitas Merdeka untuk mengevaluasi mutu pendidikan sebagai hasil penerapan KBK belum bisa dilakukan karena tidak berjalannya ikatan alumni

sehingga peneliti kesulitan mendeteksi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan alumni dan pemakai lulusan dari masing-masing perguruan tinggi, bekerja sebagai apa, kesesuaian dengan bidang yang di tempuh, serta kompetensi atas apa yang dipelajari selama proses belajar berlangsung. Sementara Universitas Katolik Darma Cendika belum bisa di evaluasi mutu pendidikannya sebagai hasil penerapan KBK karena *output*-nya belum ada dan harus menunggu 4 tahun kedepan dalam mengevaluasi KBK.

SARAN

1. Informasi-informasi yang digali dari *stakeholder* perlu diperluas tidak hanya sebatas pada kompetensi bidang keahlian dan mata kuliah yang perlu di tawarkan, namun juga terkait dengan kompetensi yang lebih di perluas sampai pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk setiap mata kuliah dan didalamnya aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap/nilai terkandung dalam mata kuliah dan/atau kurikulum.
2. Program studi harus bekerja sama dan memaksa dosen untuk mendapatkan dan membuat silabus, GBPP, SAP dan kontrak perkuliahan atau adanya koordinator dalam membuat silabus, GBPP, SAP dan kontrak perkuliahan agar proses belajar mengajar relevan dan sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. Dan mengevaluasi dosen atas kesesuaian materi yang di berikan dengan silabus. Serta perlunya program studi untuk meng *up date* silabus mengikuti perkembangan dunia kerja, buku literatur dan kompetensi pengajar itu sendiri. Peran akan penjaminan mutu perlu dipertanyakan pada Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Merdeka dan Universitas Wijaya Putra.
3. Untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang baik sarana dan prasarana harus didukung penuh oleh pihak manajemen (universitas) dan yayasan misalkan LCD, OHP dan perpustakaan. Guna menghasilkan suasana pembelajaran yang baik dan dapat meningkatkan mutu mahasiswa itu sendiri.
4. Perlunya dosen meningkatkan kemampuannya dari segi ilmu pengetahuan ilmu akuntansi dengan melakukan penelitian, analisis dan penulisan secara kreatif atas topik-topik akuntansi berkaitan dengan akuntansi yang dirasa saat

ini dari ketiga perguruan tinggi terakreditasi C (Universitas Katolik Darma Cendika, Universitas Merdeka dan Universitas Wijaya Putra) masih sangat kurang bahkan terakreditasi A dan B (Universitas Katolik Widya Mandala dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) masih diperlukan peningkatan mutu dalam melakukan penelitian. Dan peran program studi akuntansi harus lebih aktif untuk memotivasi dosen dalam penelitian, baik yang dilakukan internal manajemen (universitas) maupun program pemerintah/eksternal.

5. Perlunya program studi dan pengajar menjalin kerjasama dengan pihak swasta (perusahaan) sehingga dalam memberikan materi, lebih ke arah praktek kerja di lapangan (simulasi, studi ekskursi atau magang) dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata tentang materi yang di pelajarnya dengan cara mengetahui secara langsung kondisi-kondisi nyata yang ada di perusahaan, dan didukung dengan dasar-dasar/konsep teoritis yang ada.
6. Perlunya Mata kuliah Kerja Praktek dan Magang yang harus dikuasai dan dilatih mahasiswa sehingga tidak hanya *hard skill*, *soft skill* yang di godok dalam proses pembelajaran, namun mentalitas mahasiswa dalam bekerja juga diperlukan, sehingga mahasiswa dapat belajar bagaimana kondisi kerja di lapangan.
7. Perlunya diadakan pelatihan tentang pola penyusunan materi pembelajaran berbasis kompetensi (silabus, metode pembelajaran dan sebagainya), agar keseragaman keberlanjutan kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi dapat menghasilkan mahasiswa yang kompeten dan berdaya guna terutama Universitas Katolik Darma Cendika, Unievrstas Merdeka dan Universitas Wijaya Putra.
8. Khusus untuk program studi akuntansi S-1 Universitas Merdeka seyogyanya dilakukan perubahan kurikulum dengan menawarkan mata kuliah praktek misalkan laboratorium akuntansi, laboratorium perpajakan dan laboratorium audit.
9. Pada awal proses pembelajaran, dosen perlu melakukan *pre test* sebagai acuan untuk membandingkan dengan *post test* dalam rangka menilai kemajuan

peserta mulai dari tingkat pemahaman dasar (awal), proses belajar dan kompetensi akhir (penguasaan ilmu) pada akhir bagian.

10. Perlunya dosen meningkatkan efektifitas mengajar, mencari cara-cara baru dalam mengajar dengan kata lain kreatifitas dosen dalam SCL sangat dibutuhkan dalam menyampaikan materi kuliah dan memotivasi peserta didik.
11. Perlunya keseriusan, ketekunan dan kreatifitas program studi akuntansi atas keberlanjutan kurikulum berbasis kompetensi guna menghasilkan mahasiswa yang kompeten, mandiri, mempunyai *hard skill* dan *soft skill* dan berdaya guna.
12. Penggabungan mata kuliah antara Pancasila, Kewarganegaraan dan KKN sebagai satu rumpun mata kuliah dengan alasan bahwa kesemuanya mencerminkan kecintaan kita sebagai Warga Negara Indonesia yang terpupuk dalam pengamalan Sila-sila pada Pancasila, menjadi warganegara yang baik (dalam kewarganegaraan), dan mengaplikasikan kecintaan kita sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila dengan melakukan pengabdian di masyarakat dengan bersosialisasi langsung dengan masyarakat (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah, Firdaus, 2011, *Lulusan Perguruan Tinggi Harus Siap Pakai*. Dikutip tanggal 21 November 2011, pukul 21.00 dari www.kompas.com.
- Aqib, Zaenal dan Elham Rohmanto, 2007, *Membangun Profesionalisme dan Pengawas Sekolah*, Yrama Widya, Bandung.
- Asihono, Djoko, 2004, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Bahasa dan Sastra Indonesia*, ALTERNATIF, Jurnal Pemikiran Pendidikan, Tahun XII, No. 1, Pusat Publikasi dan Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Malang, halaman 51-59.
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2011, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*, Diva Press, Yogyakarta.
- Bloom, Benyamin S., 1956, *Bloom's Taxonomy*. Dikutip tanggal 8 November 2011, pukul 14.10 dari id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_bloom.

- Bungin, H.M. Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Furchan, Arief, Muhaimin dan Agus Maimun, 2005, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Lias, 2010, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, Gaung Persada (GP Press), Jakarta.
- Ledo, Topo, 2011, *Manfaat Stakeholder Lembaga Pendidikan*. Di-down-load tanggal 17 Maret 2011, pukul 13.20 dari <http://topengawu.blogspot.com/2011/02/manfaat-stakeholder-lembaga-pendidikan.html>.
- Liputan 6, 2010, *Mendiknas Tuntut Perguruan Tinggi Bangun Pola Pikir*. Di-download tanggal 19 Desember 2010, pukul 00.03 dari <http://id.news.yahoo.com/lptn/20101218/tpl-mendiknas-tuntut-perguruan-tinggi-ba-9c562ac.html>.
- Maharding, Mastam, 2010, *Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Yayasan Pendidikan Soroako dan Yayasan Pendidikan Masyarakat NUHA di Sulawesi Selatan*, Tesis, Universitas Negeri Surabaya.
- Mulyasa, 2007, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, Endang, 2007, *Student Centered Learning dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan, Vol. 8, No. 1. Di-download tanggal 28 November 2011, pukul 11.20 dari <http://lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/01-nugraheni.pdf>.
- Nuh, Muhammad, 2010, *Mendiknas Tuntut Perguruan Tinggi Bangun Pola Pikir*. Di-download tanggal 19 Desember 2010, pukul 00.03 dari <http://id.news.yahoo.com/lptn/20101218/tpl-mendiknas-tuntut-perguruan-tinggi-ba-9c562ac.html>, Liputan 6.
- _____, 2011, *Peran Alumni Sangat Penting Untuk Mahasiswa*. Dikutip tanggal 13 November 2011, pukul 23.42 dari <http://kampus.okezone.com/read/2011/10/07/373/512296/peran-alumni-sangat-penting-untuk-mahasiswa>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Rohani, Ahmad, 1990, *Pengelolaan Pengajaran*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sajidan, 2011, *Pengembangan Profesionalisme Guru dan Dosen*, FKIP UNS. Dikutip tanggal 28 November 2011, pukul 13.26 dari <http://sajidan.staff.fkip.uns.ac.id/2011/02/25/pengembangan-profesionalisme-guru-dan-dosen/>.

Sanjaya, Wina, 2006, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Prenada Media Group.

Santi, Marina Maya, 2010, *Meningkatkan Disiplin dan Tanggungjawab Siswa di SMA Al Hikmah*, Laporan PPL di SMA Alhikmah, Pascasarjana Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilai Hasil Belajar Mahasiswa.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Suwardjono, 2005, *Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi: Redefinisi Makna Kuliah*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dikutip tanggal 25 November 2007 dari <http://www.inparametric.com/bhinablog/download/Artikel1.pdf>.

Tampubolon, Daulat P., 2001, *Perguruan Tinggi Bermutu*, Gramedia Pustaka Utama.

Trianto, 2007, *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*, Prestasi Pustaka Publisir, Jakarta.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Winanda, Kartika, 2009, *Kompetensi*. Dikutip tanggal 28 November 2010 pukul 16.30 dari http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php?view=article&catid=25%3aindustri&id=450%3akompetensi-&option=com_content&itemid=15.

**PENGARUH MANAGERIAL OWNERSHIP DAN
INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP LEVERAGE:
SEBUAH TINJAUAN TEORITIS ¹**

Christian Herdinata

Program Studi International Business Management
Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra
UC Town, CitraLand, Surabaya

ABSTRACT

This study aims to examine how the effect of managerial ownership and institutional ownership to leverage the company's policy in Indonesia using research literature review. According to analysis carried out showed that managerial ownership and institutional ownership has an influence on leverage, so the company must pay attention to the influence that may result from managerial ownership and institutional ownership in the company in Indonesia.

Keywords: *managerial ownership, institutional ownership, leverage*

PENDAHULUAN

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham terjadi karena pada dasarnya setiap orang melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Apabila hal tersebut terjadi, akibatnya akan ada pengambilan keputusan-keputusan bisnis yang menguntungkan manajer tetapi merugikan perusahaan, misalnya penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan pada akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan kepentingan pemegang saham. Untuk meminimalkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik dan manajer, maka pemilik bisa memberikan sebagian sahamnya kepada manajer.

¹ *Acknowledgment:* Penelitian ini merupakan bagian dari pendanaan DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional melalui Program Penelitian Hibah *Fundamental* Tahun 2013.

Pemberian saham ini dapat diartikan sebagai penghargaan dari pemilik perusahaan kepada manajer atas usahanya mengelola perusahaan dengan baik. Kepemilikan saham yang diberikan kepada manajer diharapkan akan membuat manajer semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan perusahaan karena dana yang dikelolanya adalah sebagian miliknya sendiri (*managerial ownership*). Disisi lain, kepemilikan saham oleh sebuah institusi (*institutional ownership*) yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak *institutional ownership* sehingga dapat menghalangi penyimpangan-penyimpangan yang akan dilakukan oleh manajer.

Selanjutnya, beban biaya keagenan yang terjadi dari sisi pemegang saham (*agency cost of equity*) dapat dikurangi dengan mengundang pihak ketiga untuk ikut melakukan pengawasan terhadap manajemen sekaligus memberikan jalur pengambilan keputusan yang lebih terstruktur. Pihak ketiga ini biasanya disebut *bondholders* dan atau *debtholders* (selanjutnya hanya disebut *debtholders*) masuk melalui kebijakan utang (*leverage*). Seiring dengan meningkatnya *leverage*, maka *agency cost of debt* akan muncul. Semakin tinggi proporsi *leverage*, maka risiko kebangkrutan akan meningkat sehingga *debtholders* memerlukan tambahan *return* untuk menutupi tambahan risiko yang terjadi (Copeland and Weston, 1992). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh *managerial ownership* dan *institutional ownership* terhadap kebijakan *leverage*.

TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan *Leverage* Berdasarkan *Agency Theory*

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu, manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Pada kenyataannya sering terjadi konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan, karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya dari pihak lain. Jensen and

Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency problem* akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100%. Manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan sendiri dan bukan atas dasar memaksimalkan nilai dalam mengambil keputusan pendanaan. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa kondisi di atas merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelola. Manajemen tidak menggung risiko atas kesalahan dalam mengambil keputusan. Kesalahan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Oleh karena itu, pihak manajemen cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji dan status.

Ada beberapa cara untuk mengurangi *agency cost*, yaitu pertama, dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen, sehingga pihak manajemen perusahaan akan merasakan akibat langsung dari keputusan yang diambil. Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian manajer akan menggunakan dana yang ada secara optimal sehingga akan meminimalkan *agency cost*. Kedua, dengan meningkatkan pendanaan dengan utang. Peningkatan utang akan membuat pengawasan terhadap manajer oleh kreditor akan ditingkatkan, sehingga peluang manajer untuk melakukan pemborosan semakin kecil (Jensen et al., 1992). Ketiga, mengundang institutional investor sebagai monitoring agen. Moh'd et al. (1998) menyatakan bahwa distribusi saham ke institutional investor dapat mengurangi *agency cost* karena kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh institutional investor seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan institusi yang lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa jika pemilik perusahaan ingin mengurangi biaya keagenan dengan meningkatkan *managerial ownership* dan *institutional ownership*, maka kebijakan leverage perusahaan akan terpengaruh yaitu manajemen perusahaan akan mengurangi utangnya. Hal ini disebabkan karena jika *managerial ownership* ditingkatkan

maka kekayaan manajemen akan semakin terkait erat dengan kekayaan perusahaan, sehingga manajemen perusahaan akan mengurangi *financial risk* dengan cara mengurangi utang, karena dengan utang yang tinggi maka beban bunga perusahaan akan tinggi. Demikian juga, jika *institutional ownership* ditingkatkan, maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen akan semakin meningkat, seperti kebijakan manajemen atas *leverage*, karena *institutional ownership* pasti akan mempengaruhi manajemen untuk mengurangi *financial risk* dengan cara mengurangi utang.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Managerial Ownership* terhadap Kebijakan *Leverage*

Pada perusahaan yang manajemennya memiliki persentase saham yang tinggi, manajemen akan lebih memilih membiayai investasinya dengan modal sendiri, karena membiayai investasi dengan modal sendiri akan memiliki *financial risk* yang lebih rendah daripada kalau membiayai investasi dengan menggunakan utang. Hal ini karena jika perusahaan membiayai investasinya dengan modal sendiri perusahaan tidak perlu membayar bunga. Ini berbeda dengan perusahaan yang membiayai investasinya dengan utang, perusahaan wajib membayar bunga kepada kreditur, sehingga jika perusahaan dalam kesulitan keuangan, beban yang ditanggung perusahaan akan semakin berat karena harus menanggung beban bunga tersebut.

Penelitian Friend and Lang (1988), Wahidahwati (2001) serta Mahadwartha (2002) menemukan bahwa kebijakan *leverage* dipengaruhi oleh *managerial ownership* dengan hubungan negatif. *Managerial ownership* yang semakin tinggi akan membuat kekayaan pribadi manajemen akan semakin terkait erat dengan kekayaan perusahaan. Maka dengan kondisi semacam ini manajemen akan berusaha untuk mengurangi risiko kehilangan kekayaannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengurangi *financial risk* perusahaan melalui penurunan tingkat utang perusahaan.

Salah satu cara untuk mengurangi *agency cost*, yaitu dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen, sehingga pihak manajemen

perusahaan akan merasakan akibat langsung dari keputusan yang diambil. Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian manajer akan menggunakan dana yang ada secara optimal sehingga akan meminimalkan *agency cost*. Pada perusahaan yang manajemennya memiliki persentase saham yang tinggi, manajemen akan lebih memilih membiayai investasinya dengan modal sendiri, karena membiayai investasi dengan modal sendiri akan memiliki *financial risk* yang lebih rendah daripada kalau membiayai investasi dengan menggunakan utang. Hal ini karena jika perusahaan membiayai investasinya dengan modal sendiri perusahaan tidak perlu membayar bunga. Ini berbeda dengan perusahaan yang membiayai investasinya dengan utang, perusahaan wajib membayar bunga kepada kreditur, sehingga jika perusahaan dalam kesulitan keuangan, beban yang ditanggung perusahaan akan semakin berat karena harus menanggung beban bunga tersebut. Penelitian di Indonesia seperti Tandelilin and Wilberforce (2002) dan Ismiyanti (2003) dengan metoda analisis simultan juga menemukan hubungan yang ambigu antara kepemilikan manajerial terhadap kebijakan utang dan dividen. Tandelilin and Wilberforce (2002) dan Santra (2003) menggunakan data keuangan sebelum krisis menemukan hubungan negatif dan signifikan sedangkan Ismiyanti (2003) menggunakan data selama krisis menemukan hubungan positif dan signifikan. Penelitian lainnya dari Mahadwartha dengan menggunakan metode analisis *seemingly unrelated regression* (SUR), menggunakan proksi kebijakan utang yang sudah memisahkan berdasarkan kepentingan pemegang saham publik menemukan hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap kebijakan utang. Friend and Lang (1988) serta Jensen et al. (1992) yang menemukan bahwa kebijakan utang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan dengan hubungan negatif. Utang yang rendah diharapkan mengurangi risiko kebangkrutan dan kesulitan keuangan (*financial distress*). Terjadinya kesulitan keuangan juga menimbulkan konflik keagenan diantaranya melalui substitusi aset (*asset substitution*) dan investasi rendah (*underinvestment*) (Copeland and Weston, 1992) sehingga kepemilikan manajerial terkait dengan risiko kebangkrutan

atau ekspektasi kebangkrutan yang disebabkan oleh kebijakan utang. Semakin tinggi utang maka semakin rendah kepemilikan manajerial.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Friend and Lang (1988), Wahidahwati (2001) serta Mahadwartha (2002) bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *leverage* adalah negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa manajer memang tidak ingin mengambil risiko menggunakan utang untuk melakukan investasi. Hal tersebut terjadi karena risiko yang cukup besar ditanggung oleh manajer atas kegagalan dari investasi yang dilakukan dengan utang sehingga manajer lebih memilih menggunakan laba ditahan. Selain itu, utang juga akan mengharuskan manajer untuk membayar pokok utang sekaligus bunga utang yang dibebankan, sehingga hal tersebut dihindari oleh manajer. Maka dari itu, hubungan antara kepemilikan manajerial dan *leverage* menjadi negatif. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemilik perusahaan untuk dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh manajer agar tidak merugikan pemilik. Disisi lain, penggunaan utang dalam batas tertentu sesuai dengan risiko yang diperhitungkan perusahaan dapat memberikan keuntungan karena penggunaan utang juga dapat dimanfaatkan dalam bentuk pengurangan pajak sesuai dengan *trade of theory*. Penggunaan utang juga harus memperhatikan struktur aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi kebijakan utang.

Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap Kebijakan *Leverage*

Keberadaan *institutional ownership* dapat meningkatkan monitor terhadap perilaku manajemen perusahaan secara efektif, sehingga pihak manajemen perusahaan akan bekerja untuk kepentingan pemegang saham (Bathala et al., 1994, Moh'd et l., 1998, Wahidahwati, 2001). Adanya monitoring yang efektif dari *institutional ownership* menyebabkan penggunaan utang menurun karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh *institutional ownership* mengurangi *agency cost of debt*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *institutional ownership* dapat mempengaruhi utang.

Pemilik institusional akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan utang. Kebijakan utang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan sampai pada suatu tingkatan tertentu. Kondisi pemilik institusional sebagai mayoritas akan mengubah fungsi kebijakan utang yang sebelumnya mengurangi konflik keagenan menjadi kebijakan yang meningkatkan konflik keagenan pada sisi pemegang saham publik. Kondisi kepemilikan institusional yang tinggi juga meningkatkan konflik dengan pemegang saham publik karena manajemen dapat dikendalikan oleh institusional untuk melakukan *perquisites* demi kepentingan kepemilikan institusional.

Pozen (1994) berpendapat bahwa kepemilikan institusional akan bertindak untuk mendukung pemegang saham bila tindakan penekanan yang dilakukannya mempunyai nilai ekonomis atau secara langsung mempengaruhi harga saham. Perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia mempunyai komposisi struktur yang agak berbeda. Sebagian besar perusahaan emiten mempunyai pemegang saham dalam bentuk institusi bisnis (perseroan terbatas) yang seringkali merupakan representasi dari pendiri perusahaan. Penelitian ini mengistilahkan kepemilikan institusional ini sebagai kepemilikan institusional internal. Saham-saham yang dijual kepada pemegang saham publik juga ada yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional pada saham publik disebut kepemilikan institusional eksternal.

Ismiyanti (2003) menemukan bahwa rata-rata kepemilikan institusional internal pada periode 1997-2001 mencapai 66% dari total saham beredar. Hal ini menunjukkan bahwa 34% tersebar untuk investor publik (individu), manajemen, komisaris, dan kepemilikan institusional eksternal. Hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat, kepemilikan institusional eksternal mencapai 52,36% dari total saham beredar pada 1999 (Chen and Steiner, 1999). Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang

strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditunjukkan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Wien (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Kepemilikan ini mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Jadi, dengan adanya kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor institutional akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer.

Tindakan monitoring tersebut akan mengurangi biaya keagenan karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat utang yang lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati (2001) menunjukkan bahwa kehadiran kepemilikan institutional pada industri manufaktur mempunyai

pengaruh yang signifikan. Hal ini konsisten dengan Moh'd et al. (1998) bahwa para investor institutional pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI sadar bahwa keberadaan mereka dapat memonitor perilaku manajer perusahaan secara efektif sehingga pihak manajemen akan bekerja untuk kepentingan para pemegang saham. Adanya monitoring yang efektif oleh investor institutional menyebabkan penggunaan utang untuk pendanaan menurun sehingga mengurangi biaya agensi utang.

KESIMPULAN

Managerial ownership dan *institutional ownership* memiliki pengaruh terhadap *leverage*. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola dan pemegang saham institusional memiliki kepentingan tertentu, sehingga akan mempengaruhi kebijakan *leverage*.

SARAN

1. Bagi pemilik perusahaan dapat mempertimbangkan struktur kepemilikan perusahaan yang tepat dalam *managerial ownership* dan *institutional ownership*, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal.
2. Bagi kreditur atau pihak perbankan dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini terkait dengan kebijakan perusahaan terhadap *leverage*, sehingga pihak kreditur dapat optimal dalam memberikan kredit terhadap perusahaan.
3. Untuk penelitian berikutnya dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepemilikan asing, karena belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bathala, Chenchumaramaiah T., Kenneth P. Moon and Ramesh P. Rao, 1994, *Managerial Ownership, Debt Policy, and The Impact of Institutional Holding: Agency Perspective*, Financial Management, Vol. 23, Issue 3, page 38-50.
- Chen, Chen R., and Thomas L. Steiner, 1999, *Managerial Ownership and Agency Conflicts: A Nonlinear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risk Taking, Deb Policy and Dividend Policy*, The Financial Review, Vol. 34, No. 1, page 119-136.

- Copeland, T.E. and J.F. Weston, 1992, *Financial Theory and Corporate Policy*, 3rd edition, Addison-Wesley Publishing Company.
- Friend, Irwin and Larry H.P. Lang, 1988, *An Empirical Test of The Impact of Managerial Self-Interest on Corporate Capital Structure*, The Journal of Finance, Vol. 43, No. 2, page 271-282.
- Ismiyanti, F., 2003, *Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Insitutional, Risiko, Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen: Analisis Persamaan Simultan*, Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
- Jensen, Gerald R., Donald P. Solberg and Thomas S. Zorn, 1992, *Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, No. 2, page 247-263.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling, 1976, *Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Capital Structure*, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, page 305-360.
- Mahadwartha, P.A, 2002, *Uji Teori Keagenan Dalam Hubungan Interdependensi Antara Kebijakan Utang dengan Kebijakan Dividen*, Simposium Nasional Akuntansi V, page 635-647.
- Moh'd, Mahmoud A., Larry G. Perry and James N. Rimbey, 1998, *The Impact Of Ownership Structure On Corporate Debt Policy: A Time Series Cross-Sectional Analysis*, The Finance Review, Vol. 33, Issue 3, page 85-98.
- Pozen, Robert C., 1994, *Institutional Investors: The Reluctant Activist*, Harvard Business Review, page 140-150.
- Santra, K., 2003, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Struktur Modal Perusahaan*, Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
- Tandelilin, E., and Wilberforce, T., 2002, *Can Debt and Dividend Policies Substitute Insider Ownership in Controlling Equity Agency Conflict*, Gadjah Mada International Journal of Business 4/1, page 31-44.
- Tarjo, 2008, *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capital*, Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Wahidahwati, 2001, *Pengaruh kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan : Sebuah perspektif Agency Theory*, Simposium Nasional Akuntansi IV.

Wien, I., 2010, *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*, Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro.

ANTISIPASI PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TERHADAP PRAKTEK PERPAJAKAN NEGARA-NEGARA TAX HAVEN

Setiadi Alim Lim

Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya

Lilik Indrawati

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

To attract investors, some countries called tax haven countries have done unfair taxation practices. The practice of taxation by the tax haven countries encourage further growth in the activity of tax avoidance and tax evasion internationally. Almost all countries in the world are harmed by the practice of taxation of tax haven countries. The OECD has limited the practices unfair taxation of tax haven countries. Each country around the world will try to anticipate intensely the activity of tax avoidance and tax evasion through international cooperation and incorporate prevention efforts in taxation regulations. This paper will try to assess whether the provision of taxation in Indonesia has been able to anticipate the activities of international tax avoidance and tax evasion.

Keywords: *tax haven country, tax avoidance, tax evasion.*

PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan negara di seluruh dunia memerlukan dana yang besar untuk membangun negaranya masing-masing. Dana yang dibutuhkan digunakan membiayai pengeluaran rutin operasional penyelenggaraan negara dan untuk membangun berbagai infrastruktur. Semakin besar penerimaan yang diperoleh oleh suatu negara, maka akan semakin besar pula dana yang tersedia untuk membiayai belanja negara. Negara yang mempunyai jumlah penerimaan besar

akan mampu untuk membangun negaranya lebih cepat dibandingkan negara yang memiliki penerimaan relatif kecil.

Pada umumnya sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, setiap negara akan menggunakan berbagai strategi dalam sistem pemungutan pajaknya. Salah satu jenis pajak yang umum diberlakukan di setiap negara adalah pajak penghasilan. Berkaitan dengan pajak penghasilan ini ada sejumlah negara yang menerapkan tarif yang sangat rendah bahkan ada yang mengenakan tarif 0%. Negara-negara ini umumnya dikenal sebagai negara-negara surga pajak (*tax haven countries*).

Tujuan utama dari pemerintah negara-negara *tax haven* adalah menarik investor untuk menanamkan dananya di negara-negara *tax haven*, sebagian besar dalam bentuk *foreign direct investment* (Hines, 2005; Desai et al., 2006; Hines, 2007; Dharmapala and Hines, 2009). Selain tarif pajak yang rendah, negara-negara *tax haven* juga menawarkan fasilitas lain kepada para investor, seperti kerahasiaan bank dan kerahasiaan informasi mengenai entitas legal (Tax Justice Network, 2007). Apa yang ditawarkan oleh negara-negara *tax haven* ini sangat menarik, karena di samping beban pajak yang harus dibayar di negara *tax haven* cenderung sangat kecil, pihak-pihak tertentu dimungkinkan pula untuk menggunakan negara *tax haven* sebagai tempat untuk pencucian uang (*money laundry*), karena adanya aturan dan ketentuan tentang kerahasiaan yang ketat.

Suatu negara yang memilih menjadi negara *tax haven* akan menghadapi konsekwensi pengurangan yang signifikan dalam penerimaannya dari sektor pajak penghasilan sebagai akibat pemberlakuan tarif pajak rendah. Pengurangan dari pendapatan pajak penghasilan suatu negara *tax haven* secara prinsip akan diperoleh kembali melalui peningkatan pendapatan pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (Dharmapala and Hines, 2009). Di samping itu penerapan tarif pajak langsung yang rendah pada investasi bisnis mungkin akan menghasilkan peningkatan penghasilan dari pajak, jika kegiatan ekonomi berkembang karena penerapan tarif pajak yang rendah tersebut, menghasilkan kekayaan dan konsumsi untuk menambah basis pajak (Hines, 2005).

Saat ini di seluruh dunia ada sekitar 45 negara yang digolongkan sebagai *major tax haven*. Sebagai contoh Andora, Irlandia, Luksemburg dan Monaco di Eropa, Hongkong dan Singapura di Asia dan Kepulauan Cyman, Netherlands Antilles dan Panama di Amerika (Hines, 2007). FAC (Fiscal Affairs Committee) dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) pada laporan yang pertama tahun 1998 dan laporan yang kedua pada tahun 2000 mengidentifikasi ada 35 negara *tax haven* yang terlibat dalam praktek pajak yang berbahaya (OECD, 2000 dalam Hampton and Christensen, 2002; Hishikawa, 2002). Jumlah penduduk negara *major tax haven* kurang dari 1% jumlah penduduk dunia (di luar Amerika Serikat), tetapi memiliki 2,3% dari GDP dunia (Hines, 2005).

Tarif pajak rendah yang diterapkan oleh negara-negara *tax haven* ini membuka banyak peluang bagi aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut Hebous (2011) suatu *tax haven* di mata publik adalah suatu *haven* untuk *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dharmapala and Hines (2009) menyatakan *tax haven* menarik investasi asing tidak hanya disebabkan penghasilan yang diperoleh dipajaki dengan tarif yang sangat menguntungkan, tetapi juga karena *tax haven* memfasilitasi aktivitas *tax avoidance* terhadap pajak yang mungkin harus dibayar ke negara lain. Desai et al. (2006) menyatakan *tax haven* adalah yurisdiksi dengan tarif pajak rendah yang menyediakan investor kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik di yurisdiksi dengan pajak lebih rendah dari pada di Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan dari tarif pajak perusahaan asing yang rendah dikategorikan *avoidance*, sedangkan seorang warga negara Amerika Serikat yang memiliki rekening bank rahasia di Karibia dan bunga yang diperoleh dari rekening tersebut tidak dilaporkan sebagai pendapatan bunga dinyatakan sebagai *evasion* (Gravelle, 2013).

Negara-negara *tax haven* menjadi tempat yang banyak memberikan kemudahan bagi aktivitas *tax avoidance* maupun *tax evasion* yang banyak merugikan pendapatan pajak dari negara-negara di seluruh dunia. Slemrod and Wilson (2009) menyatakan *haven* adalah parasit bagi pendapatan pajak dari negara-negara *non tax haven*, menyebabkan negara-negara *non tax haven* harus

mengeluarkan sumber daya riil untuk mempertahankan pendapatannya. Maffini (2009) menyatakan secara rata-rata, tarif pajak efektif marginal dari suatu grup perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara-negara *tax haven* lebih rendah 1% dibandingkan dengan grup perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di negara-negara *tax haven*. Gravelle (2013) menyatakan pemerintah federal kehilangan pendapatan dari pajak penghasilan orang pribadi dan perusahaan karena adanya aktivitas pemindahan laba dan penghasilan ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Pendapatan pajak yang hilang dari aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* ini sulit untuk ditaksir, tetapi beberapa menyatakan bahwa kerugian yang diderita Amerika Serikat sekitar US\$ 100 bilyun per-tahun. Menurut Afrasinei (2013) Rumania menghadapi masalah yang sama berkaitan dengan *tax avoidance* yang dihubungkan dengan *tax haven* dan Kementerian Keuangan mengestimasi kerugian *offshore operation* di negara *tax haven* diperkirakan antara 3 dan 4 bilyun Euro.

Sejak tahun 1998 OECD telah mempromosikan suatu kerjasama global untuk memerangi praktek-praktek pajak yang membahayakan (Hishikawa, 2002). OECD telah mengeluarkan daftar negara-negara yang dianggap mempraktekkan sistem pajak yang membahayakan. Daftar ini dari waktu ke waktu selalu direvisi dengan mengeluarkan dari daftar, negara-negara yang dianggap sudah mau bekerjasama untuk memperbaiki sistem perpajakannya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh OECD. Gravelle (2013) juga menyatakan bahwa aksi baru-baru ini yang dilakukan oleh OECD dan negara-negara industri G-20 ditujukan kepada negara-negara *tax haven* dengan fokus utama pada isu *evasion*. Dalam hal ini sistem perpajakan dengan tarif rendah yang dikembangkan oleh negara-negara *tax haven* telah memberikan dampak berkurangnya penerimaan pajak dari negara-negara lain, baik melalui praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* maupun karena *tax competition* yang tidak sehat. Karenanya praktek perpajakan dengan tarif rendah yang dilakukan oleh negara-negara *tax haven* terus diperangi oleh negara-negara lain yang dipelopori oleh OECD dan kelompok negara G-20. OECD telah mewajibkan semua negara-negara *tax haven* untuk mengubah sistem

perpajakannya disesuaikan dengan standar internasional. Bagi negara yang tidak melakukan perubahan sistem perpajakannya akan diberikan sanksi.

Gravelle (2013) menyebutkan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk *corporate tax avoidance* yaitu *allocation of debt and earnings stripping, transfer pricing, control manufacturing, check-the box, hybrid entities and hybrid instruments, cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*. Dengan menggunakan berbagai metode tersebut, suatu perusahaan multinasional dapat meminimalkan pengenaan pajak keseluruhan yang dibebankan kepada grup perusahaannya dengan cara yang tidak benar memanfaatkan berbagai kemudahan yang ada di negara-negara *tax haven*.

Dalam tulisan ini akan dibahas apakah peraturan dan ketentuan pajak yang ada di Indonesia telah mampu mengantisipasi praktek-praktek kecurangan pajak dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di negara *tax haven* menggunakan berbagai metode seperti yang disebutkan oleh Gravelle (2013) di atas. Peraturan dan ketentuan pajak yang dimaksud berupa Undang-Undang perpajakan beserta peraturan pelaksana lainnya.

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK TAX HAVEN

Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai pengertian dari *tax haven*. *Tax haven* di Perancis dikenal sebagai *tax paradise* dan di Jerman dikenal sebagai *tax oasis* (Orlov, 2004). Menurut Dharmapala and Hines (2009) *tax haven* adalah: (1) lokasi dengan tarif pajak sangat rendah dan atribut pajak lainnya yang didesain untuk menarik investor asing; (2) biasanya merupakan negara kecil dan lebih makmur dari negara lainnya; (3) umumnya penduduknya di bawah 1 juta; serta (4) mempunyai indeks kualitas tata kelola (*good governance*) yang baik. Mengenai jumlah penduduk, Slemrod and Wilson (2009) menyatakan rata-rata jumlah penduduk *tax haven* adalah 284.000 orang dan rata-rata 116.000 orang jika tidak termasuk 2 negara: Liberia dan Panama. Desai et al. (2004, 2006) memberikan definisi *tax haven* adalah yurisdiksi dengan tarif pajak rendah yang menyediakan kesempatan kepada investor untuk melakukan *tax avoidance*. Hines (2007) mendefinisikan *tax haven* sebagai yurisdiksi dengan tarif

pajak rendah yang menawarkan kepada bisnis dan individu kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Gravelle (2013) menyatakan bahwa *tax avoidance* internasional dapat timbul dari investor individu yang sangat kaya dan perusahaan multinasional yang besar dan dapat merefleksikan tindakan yang legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*). Rosenzweig (2010) menyatakan *tax haven* merupakan akar penyebab banyaknya kekurangan fiskal yang mengganggu pemerintahan di seluruh dunia.

OECD (1998) menyatakan faktor-faktor yang menunjukkan suatu yuridiksi sebagai *tax haven* terdiri dari: (a) tidak membebankan pajak atau hanya membebankan pajak nominal pada penghasilan yang relevan; (b) kurang efektifnya pertukaran informasi mengenai wajib pajak; (c) kurang adanya transparansi di dalam operasi dari legislatif dan aturan legal atau administratif; dan (d) tidak adanya kewajiban aktivitas yang substansial bagi investor asing. Jansky and Prats (2013) menyatakan dua alasan utama mengapa *tax haven* memainkan peranan yang penting: (1) *tax haven* menawarkan tarif pajak rendah atau 0, yang merupakan insentif penting bagi perusahaan dan individu untuk menggeser penghasilannya dari yuridiksi yang menerapkan pajak tinggi; (2) *tax haven* sering menawarkan ketentuan tentang kerahasiaan yang memfasilitasi praktek *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Dari definisi dan uraian *tax haven* di atas dapat disimpulkan bahwa *tax haven* adalah yuridiksi bisa berupa negara yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) biasanya negara kecil, lebih makmur dari negara lainnya, mempunyai penduduk dan tenaga kerja umumnya di bawah 1 juta, memiliki sumber daya alam dan modal yang kecil serta mempunyai indeks kualitas tata kelola yang baik; (2) memberlakukan tarif pajak rendah atau 0%; (3) mempunyai aturan kerahasiaan yang menyebabkan kurangnya transparansi, seperti kerahasiaan bank, kerahasiaan informasi pajak dengan yuridiksi lainnya, menutupi informasi mengenai *beneficiary ownership* dan lainnya; dan (4) tidak ada ketentuan bahwa individu dan entitas di *tax haven* harus mempunyai aktivitas substansial; yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk menarik investor dari luar yuridiksi dan memberikan peluang terjadinya *tax avoidance* dan *tax evasion*. Desai et al. (2006) menyatakan

bahwa operasi dari *tax haven* memfasilitasi *tax avoidance* dengan cara mengizinkan perusahaan untuk merelokasi penghasilan kena pajak ke luar dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi dan mengurangi beban pajak penghasilan dari luar negeri yang akan dipungut negara domisili perusahaan.

Praktek yang dilakukan negara *tax haven* dengan tarif pajak rendah dan aturan kerahasiaan telah memfasilitasi tumbuh suburnya aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion*. Terjadi pelarian/pergeseran keuntungan dari negara *non tax haven* ke negara-negara *tax haven* melalui berbagai rekayasa menggunakan berbagai instrumen. Menurut Jansky and Prat (2013) beberapa strategi yang digunakan untuk *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah distorsi harga transfer *intra-firm*, distorsi struktur hutang-ekuitas perusahaan, strategi lokasi aset dan biaya overhead. Gravelle (2013) menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk *corporate tax avoidance* antara lain: *allocation of debt* dan *earnings stripping*, *transfer pricing*, *control manufacturing*, *check-the box*, *hybrid entities and hybrid instruments*, *cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*.

RESPON TERHADAP PRAKTEK TAX HAVEN

Kerugian yang diderita negara-negara *non tax haven* sebagai dampak aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara *tax haven* dari waktu ke waktu selalu meningkat dan relatif semakin besar. Praktek pajak dengan tarif rendah yang sudah dilakukan oleh negara-negara *tax haven* ini menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat antar negara dalam memperoleh pendapatan pajak dari aktivitas bisnis asing (*non fair tax competition*).

Setiap negara *non tax haven* di seluruh dunia akan menghadapi dampak dari praktek *unfair tax competition* yang dilakukan oleh negara-negara *tax haven*. Dampak yang dihadapi dapat berupa berkurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Namun bila negara yang bersangkutan mempunyai kelebihan-kelebihan lain yang bisa menarik investor seperti berlimpahnya sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, fasilitas infrastruktur yang baik, tata kelola

pemerintahan yang baik dan lainnya, maka walaupun tarif pajak di negara tersebut relatif tidak serendah di negara *tax haven*, tetap saja dianggap menarik bagi investor.

Dampak lain dari praktek *tax haven* adalah berkurangnya penghasilan pajak dari negara-negara *non tax haven* sebagai akibat praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* dari wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan negara *tax haven*. Tarif pajak rendah yang diterapkan negara *tax haven* akan mendorong wajib pajak, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi secara transnasional dan memiliki unit-unit usaha di seluruh dunia untuk menggeser keuntungannya dari negara-negara *non tax haven* ke negara-negara *tax haven*. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara, antara lain menggunakan metode harga transfer (*transfer pricing*) yang tidak sesuai dengan *arm's length price*. Misalkan harga material yang dibeli oleh kantor cabang "A" yang berlokasi di negara *tax haven* dari kantor cabang "B" yang berlokasi di negara *non tax haven* dibuat lebih rendah dari *arm's length price*. Hal ini secara tidak langsung sama dengan menggeser sebagian keuntungan dari kantor cabang "B" ke kantor cabang "A". Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan pembebanan bunga utang ke kantor cabang yang berada di negara *non tax haven* oleh kantor cabang yang berkedudukan di negara *tax haven*. Metode ini dikenal sebagai *earnings stripping*.

Negara-negara *non tax haven* yang dirugikan dengan praktek pajak dari negara *tax haven* memberikan respon secara kelompok dan individu. Respon secara kelompok dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam G-20 dan OECD dalam bentuk tekanan terhadap negara-negara *tax haven* untuk mempraktekkan konsep pajak yang *fair* dan sehat. Negara-negara G-20 dan OECD melakukan kampanye besar-besaran untuk memerangi praktek pajak tidak sehat yang dilakukan oleh negara *tax haven*. OECD berusaha mengeliminasi praktek-praktek pajak yang membahayakan sejak tahun 1998 melalui kerangka kerjasama global (Hishikawa, 2002). Pada tahun 2000, OECD mengeluarkan daftar 35 negara yang dianggap melakukan praktek *tax haven* (OECD, 2000). Daftar negara-negara tersebut seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Daftar Negara Tax Haven

No.	Nama Negara Tax Haven	No.	Nama Negara Tax Haven
1.	Andorra	19.	The Republic of the Maldives
2.	Anguilla – Overseas Territory of the United Kingdom	20.	The Republic of the Marshall Islands
3.	Antigua and Barbuda	21.	The Principality of Monaco
4.	Aruba – Kingdom of the Netherlands	22.	Montserrat – Overseas Territory of the United Kingdom
5.	Commonwealth of the Bahamas	23.	The Republic of Nauru
6.	Bahrain	24.	Netherlands Antilles – Kingdom of the Netherlands
7.	Barbados	25.	Niue – New Zealand
8.	Belize	26.	Panama
9.	British Virgin Islands – Overseas Territory of the United Kingdom	27.	Samoa
10.	Cook Islands – New Zealand	28.	The Republic of the Seychelles
11.	The Commonwealth of Dominica	29.	St. Lucia
12.	Gibraltar – Overseas Territory of the United Kingdom	30.	The Federation of St. Christopher & Nevis
13.	Grenada	31.	St. Vincent and the Grenadines
14.	Guernsey/Sark/Alderney – Dependency of the British Crown	32.	Tonga
15.	Isle of Man – Dependency of the British Crown	33.	Turks & Caicos – Overseas Territory of the United Kingdom
16.	Jersey – Dependency of the British Crown	34.	US Virgin Islands – External Territory of the United States
17.	Liberia	35.	The Republic of Vanuatu
18.	The Principality of Liechtenstein		

Sumber: OECD (2000)

Menurut Gravelle (2013) saat ini daftar yang berisi nama negara-negara yang diindikasikan *tax haven* yang disusun OECD pada tahun 2000 telah dikembangkan menjadi 3 buah daftar yang berisi nama negara-negara yang dihubungkan dengan ketaatan dalam menerapkan standar aturan pajak yang

ditetapkan oleh OECD. Daftar putih (*white list*) berisi nama negara-negara yang mengimplementasikan standar pajak OECD, daftar abu-abu (*gray list*) berisi nama negara-negara yang komitmen terhadap standar pajak OECD dan daftar hitam (*black list*) yang berisi nama negara-negara yang tidak komitmen dengan standar pajak OECD.

Di samping respon secara berkelompok dalam bentuk kerjasama global melalui kelompok G-20, OECD dan atau kelompok kerjasama lainnya, masing-masing negara secara individu akan menangkai praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha melalui ketentuan dan aturan pajak nasionalnya. Sebagian besar negara memasukkan ketentuan berhubungan dengan penangkalan praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam Undang-Undang pajak nasionalnya yang bersifat umum. Tetapi beberapa negara ada yang secara khusus mempunyai aturan atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang ketentuan anti *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Dari 2 cara respon yang diberikan oleh negara-negara *non tax haven* terhadap praktek pajak tidak *fair* dari negara-negara *tax haven* ini, nampaknya yang sangat efektif adalah tekanan yang dilakukan melalui OECD. Namun apa yang dilakukan oleh OECD untuk memerangi praktek-praktek pajak yang tidak sehat ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh OECD tersebut sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri dari negara-negara tersebut, di mana masing-masing negara sebagai negara berdaulat seharusnya mempunyai otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk peraturan pajak. Hal ini seperti diungkapkan oleh Hishikawa (2002) bahwa banyak negara-negara persemakmuran memandang tindakan OECD sebagai suatu pelanggaran kedaulatan mereka dan OECD dituduh sebagai tirani.

Walaupun banyak mengalami hambatan, usaha OECD untuk memerangi praktek-praktek pajak yang tidak sehat ini dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Pada saat ini semua negara yang dianggap *tax haven* sudah berkomitmen untuk mengimplementasikan standar pajak internasional yang disarankan oleh OECD. Dari seluruh negara yang sudah berkomitmen tersebut,

sebagian negara secara substansial sudah mengimplementasikan standar pajak internasional, sedangkan sebagian lagi sebanyak 19 negara *tax haven* dan 6 negara *financial centres* secara substansial belum mengimplementasikan standar pajak internasional (OECD, 2010). Tabel 2 di bawah ini menunjukkan daftar negara-negara yang belum mengimplementasikan standar pajak internasional.

Tabel 2
Daftar Negara Yang Sudah Berkomitmen Melaksanakan Standar Pajak Internasional Tetapi Belum Mengimplementasikannya Secara Substansial

Nama Negara	Tahun Komitmen Implementasinya	Nama Negara	Tahun Komitmen Implementasinya
<i>Tax Havens</i>			
Andorra	2009	Nauru	2003
Anguilla	2002	Niue	2002
Bahamas	2002	Panama	2002
Belize	2002	St. Kitts and Nevis	2002
Cook Islands	2002	St. Lucia	2002
Dominica	2002	St. Vincent and the Grenadines	2002
Grenada	2002	Vanuatu	2003
Liberia	2007		
Marshall Islands	2007		
Montserrat	2002		
<i>Other Financial Centres</i>			
Brunei	2009	Malaysia	2009
Costa Rica	2009	Philippines	2009
Guatemala	2009	Uruguay	2009

Sumber: OECD (2010)

Dari daftar negara yang ada pada Tabel 1 dan Tabel 2 nampak bahwa dari 35 negara yang digolongkan sebagai *tax haven* oleh OECD pada tahun 2000, sejak tahun 2010 tinggal 17 negara saja seperti terlihat pada Tabel 2. Karena 18 negara lagi sudah memenuhi komitmen untuk melaksanakan standar pajak internasional yang dianjurkan oleh OECD, yaitu: Antigua and Barbuda, Aruba – Kingdom of the Netherlands, Bahrain, Barbados, British Virgin Islands – Overseas Territory of the United Kingdom, Gibraltar - Overseas Territory of the United Kingdom, Guernsey/Sark/Alderney – Dependency of the British Crown, Isle of Man – Dependency of the British Crown, Jersey - Dependency of the British Crown, The Principality of Liechtenstein, The Republic of the Maldives,

The Principality of Monaco, Netherlands Antilles – Kingdom of the Netherlands, Samoa, The Republic of the Seychelles, Tonga, Turks & Caicos – Overseas Territory of the United Kingdom, US Virgin Islands – External Territory of the United States.

LANGKAH ANTISIPASI INDONESIA TERHADAP PRAKTEK NEGARA TAX HAVEN

Walaupun dampaknya tidak separah negara maju, Indonesia sebagai sebagai salah satu negara *non tax haven* juga mengalami dampak dari praktek pajak negara-negara *tax haven*. Praktek-praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional dimungkinkan terjadi dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara-negara *tax haven*. Hal ini mengingat bahwa sudah banyak perusahaan di Indonesia yang beroperasi secara transnasional dengan memiliki banyak cabang dan anak perusahaan di luar negeri serta banyak pula individu perseorangan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Di samping itu Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu tujuan investasi menarik dari berbagai perusahaan multinasional negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Penghasilan dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri Indonesia dan penghasilan dari Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri adalah obyek dari aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional.

Karena adanya fasilitas dari negara-negara *tax haven*, maka perusahaan multinasional ini dimungkinkan untuk menggeser keuntungannya dari Indonesia ke negara-negara *tax haven* dengan tujuan untuk mendapatkan keringan beban pajak, mengingat tarif pajak di Indonesia relatif jauh lebih tinggi dari pada tarif pajak yang diberlakukan oleh negara-negara *tax haven*. Praktek yang dilakukan melalui aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penting untuk memerangi atau membatasi aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* yang

memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara *tax haven*. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Indonesia sebagai salah satu anggota dari negara G-20 bersama-sama dengan OECD melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong negara-negara melakukan praktek pajak yang *fair* di seluruh dunia. Dalam hal ini OECD telah menyusun suatu standar pajak internasional yang *fair* dan dapat diterima secara umum. Bagi negara-negara yang belum melaksanakan standar pajak ini dilakukan pendekatan agar yang bersangkutan dapat bergabung dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan praktek pajak yang *fair* untuk menciptakan suasana yang kondusif guna terealisasinya *tax competition* yang sehat. Melalui pendekatan yang dilakukan OECD telah berhasil membuat semua negara di dunia berkomitmen untuk mengimplementasikan standar pajak internasional tersebut, walaupun sampai dengan tahun 2013 masih ada beberapa negara *tax haven* dan negara OFC (*Offshore Finance Centre*) yang walaupun sudah berkomitmen tetapi belum mengimplementasikannya.
2. Indonesia telah melakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara-negara lain untuk membatasi ruang gerak para avonturir pajak yang ingin mengeruk keuntungan dari kelemahan peraturan pajak dari suatu negara dalam mengantisipasi transaksi bisnis transnasional. Jumlah negara yang sudah mengadakan P3B dengan Indonesia sampai dengan saat ini berjumlah 63 negara.
3. Di dalam peraturan dan ketentuan pajaknya, Indonesia juga telah membuat ketentuan untuk membatasi dan mengurangi praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* yang memanfaatkan fasilitas dari negara *tax haven*. Beberapa ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal-hal berkaitan dengan pencegahan praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* yang memanfaatkan fasilitas dari negara *tax haven* antara lain:
 - a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing*.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Jadi Indonesia dalam memerangi *tax evasion* dan *tax avoidance* yang melibatkan negara *tax haven* melakukan 3 langkah pokok tersebut di atas.

EVALUASI LANGKAH ANTISIPASI INDONESIA TERHADAP PRAKTEK NEGARA TAX HAVEN

Berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* yang diberikan oleh negara *tax haven*, Gravelle (2013) menyatakan metode penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terdiri dari: *allocation of debt and earnings stripping, transfer pricing, contract manufacturing, check the box, hybrid entities, hybrid instruments, cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*.

Evaluasi perlu dilakukan terhadap langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Apakah langkah-langkah yang telah diambil sudah mampu untuk mengantisipasi metode penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Berikut ini akan dievaluasi apakah metode-metode penghindaran pajak seperti yang disebutkan Gravelle (2013) di atas dapat diantisipasi dengan peraturan perpajakan yang sudah ada di Indonesia:

1. *Allocation of debt and earnings stripping* adalah metode yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser labanya dari yuridiksi yang mempunyai tarif pajak tinggi ke yuridiksi yang menetapkan tarif pajak rendah (negara *tax haven*) dengan cara membebankan beban bunga pinjaman ke perusahaan anggota grup perusahaan multinasional yang berlokasi di negara *non tax haven* oleh anggota grup perusahaan multinasional yang berada di negara *tax haven*. Karena dibebani beban bunga yang besar dari perusahaan afiliasinya di negara *tax haven*, maka laba yang diperoleh perusahaan afiliasi yang berada di negara *non tax haven* menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya. Rekayasa yang semacam ini dinamakan *earnings stripping*. Schadewald and Misesy (2005) dalam Knipe et al. (2009) menyatakan bahwa pada masa lalu metode yang digunakan IRS (Internal Revenue Service) di Amerika Serikat untuk memerangi aktivitas *earnings stripping* adalah mencoba mengklasifikasi utang *intercompany* sebagai ekuitas menggunakan argumen substansi mengungguli bentuk yang sering kali sulit diterapkan. Di dalam perkembangan berikutnya Kongres Amerika Serikat

kemudian menyetujui penambahan ketentuan anti *earnings stripping* dalam IRC (Internal Revenue Code) seksi 163(j) yang dikenal sebagai RRA'89 (Revenue Reconciliation Act of 1989) dalam usaha mencegah erosi pada basis pajak di Amerika Serikat akibat strategi *earnings stripping*. Pada intinya RRA'89 menyatakan pembebanan bunga pada sebuah anak perusahaan domestik akan ditolak bila terpenuhi kondisi sebagai berikut: (1) perusahaan mempunyai rasio *debt to equity* (DER) lebih dari 1,5 berbanding 1 pada hari terakhir tahun terkait; (2) perusahaan membayar atau masih harus membayar *disqualified interest* yaitu bunga yang dibayar kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang seluruh atau sebagian pendapatan bunganya merupakan pendapatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan di Amerika Serikat; (3) perusahaan tersebut mempunyai kelebihan beban bunga untuk tahun tersebut, artinya biaya bunga netto nya melebihi 50% dari pendapatan kena pajak yang disesuaikan ditambah beberapa kelebihan terbatas yang dibawa pada tahun tersebut (Knipe et al., 2009). Apa yang dilakukan di Amerika Serikat kemudian menginspirasi pemerintah Jepang untuk mengeluarkan aturan anti *earnings stripping*. Menurut KPMG (2012) peraturan *earnings stripping* di Jepang diperkenalkan melalui reformasi perpajakan tahun 2012 dengan tujuan mencegah *tax avoidance* dengan membatasi pengurangan beban bunga yang dibayar kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan diberlakukan untuk tahun pajak yang dimulai atau sesudah tanggal 1 April 2013. Apa yang diatur dalam aturan *earnings stripping* di Jepang hampir sama dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Indonesia sendiri selama ini belum mempunyai aturan khusus yang mengatur anti *earnings stripping*. Bila ditelusuri dengan seksama memang ada beberapa peraturan perpajakan di Indonesia yang ada kaitannya dengan perhitungan beban bunga yang boleh dibebankan sebagai biaya antara lain:

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (1) menyatakan Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara

utang dan modal perusahaan. Berdasarkan ketentuan ini kemudian Menteri Keuangan telah pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan yang menyatakan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri ditetapkan setinggi-tingginya 3 : 1. Tetapi kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tanggal 8 Maret 1985 menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 dan penundaan tersebut berlaku sampai dengan saat ini.

- b. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) menyebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Berdasarkan ketentuan ini Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain yang berhubungan dengan pembebanan biaya bunga yang diperbolehkan untuk perusahaan yang membayarkannya kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang telah diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Dari beberapa aturan yang telah diuraikan di atas baik dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan maupun Keputusan/Peraturan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nampak bahwa aturan yang ada belum mengatur suatu pedoman dasar yang jelas dan pasti berhubungan dengan pembebanan biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti halnya ketentuan anti *earnings stripping* di Amerika Serikat dan Jepang. Tidak ada pengaturan mengenai rasio utang dan modal serta tidak ada rumusan pasti mengenai beban bunga yang boleh dibiayakan. Yang diatur lebih banyak pada penanganan kasus per-kasus. Siahaan (2010) juga menyatakan bahwa penanganan masalah *thin capitalization (earnings stripping)* di Indonesia mengalami kesulitan karena belum adanya *Fixed/Static DER (Debt to Equity Ratio)*. Karena itu seharusnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu memikirkan untuk membuat aturan yang lebih lengkap dan detil tentang anti *earnings stripping*.

2. *Transfer pricing* adalah harga yang disepakati atas barang dan atau jasa yang ditransfer dari satu pihak kepada pihak lainnya di dalam satu entitas perusahaan atau beberapa entitas perusahaan dalam satu grup. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan *transfer pricing* untuk menggeser keuntungan yang diperoleh grup perusahaannya dari negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke negara yang menggunakan tarif pajak rendah. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) dan (3a) telah mengatur tentang penentuan harga transfer dari transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengaturan selanjutnya antara lain melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement = APA*) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pada dasarnya ketentuan peraturan yang ada menyatakan harga transfer yang digunakan adalah *arm's length price*. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa pasal 11 ayat (2) menyatakan metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah: metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*), metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*), metode biaya-plus (*cost plus method/CPM*), metode pembagian laba (*profit split method/PSM*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*). Untuk masalah *transfer pricing*, peraturan dan ketentuan yang ada di Indonesia seperti diuraikan di atas sudah cukup mampu untuk mencegah praktek-praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* memanfaatkan *transfer pricing* dengan tujuan memindahkan laba yang diperoleh dari Indonesia ke negara-negara yang memberlakukan tarif pajak rendah (*tax haven.countries*).

3. *Contract manufacturing* adalah salah satu metode yang digunakan perusahaan multinasional untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dengan cara mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven* yang melakukan kontrak produksi dan pemasaran dengan perusahaan lain di negara *non tax haven*. Sebetulnya perusahaan multinasional itu dapat langsung mendirikan anak perusahaan di negara *non tax haven* yang mempunyai prospek bisnis sangat

menguntungkan untuk kegiatan produksi dan pemasaran produknya. Namun karena negara *non tax haven* ini memberlakukan tarif pajak yang tinggi, maka untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar didirikan anak perusahaan tersebut di negara *tax haven* dan melakukan *contract manufacturing* dengan perusahaan di negara *non tax haven* yang sangat prospektif untuk bisnis yang dijalankannya. Ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia belum mengantisipasi adanya praktek yang semacam ini. Karenanya pemerintah perlu memikirkan untuk membuat peraturan yang dapat mengantisipasi praktek bisnis semacam ini yang bermotif untuk mendapatkan keringanan pajak.

4. *Check the box, hybrid entities and hybrid instruments.* *Check the box* adalah ketentuan perpajakan di Amerika Serikat yang membolehkan entitas di Amerika Serikat untuk tujuan perpajakan memilih sebagai *partnership*, *corporation* atau diabaikan sebagai suatu entitas yang terpisah (bisa menjadi *sole proprietorship* atau cabang/divisi). Ketentuan ini sering disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan perpajakan. *Hybrid entities* adalah entitas yang diperlakukan sebagai bentuk badan hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sedangkan *hybrid instruments* adalah instrumen bisnis yang diperlakukan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adanya perbedaan perlakuan entitas dan instrumen bisnis ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan perpajakan melalui berbagai rekayasa bisnis. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengakomodasi praktek *check the box*, sehingga tidak perlu ada suatu aturan yang dibuat untuk mengantisipasi penyalahgunaan ketentuan *check the box*. Sedangkan untuk praktek-praktek yang memanfaatkan *hybrid entities* dan *hybrid instruments* perlu diantisipasi oleh Indonesia dengan membuat suatu peraturan yang menegaskan bahwa ketentuan hukum mengenai badan hukum perusahaan multinasional beserta afiliasinya yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia atau instrumen

bisnis yang dimiliki untuk keperluan perpajakan harus mengacu pada ketentuan badan hukum dan instrumen bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

5. *Cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits.* *Cross crediting for foreign tax credits* adalah ketentuan yang memperbolehkan wajib pajak untuk mengkreditkan seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dari semua negara digabung satu menjadi kredit pajak dan dibandingkan dengan batas kredit pajak maksimum yang diperbolehkan. Metode kredit pajak luar negeri semacam ini rawan dipergunakan oleh perusahaan multinasional merekayasa transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak dengan tidak benar. Indonesia tidak menggunakan sistem pengkreditan pajak gabungan dari semua negara sumber, tetapi menggunakan pendekatan perhitungan kredit pajak per negara yang dibandingkan dengan batas kredit pajak maksimum yang dikenakan sesuai tarif Pajak Penghasilan di Indonesia (pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Jadi untuk peraturan di Indonesia tidak memberikan peluang penyalahgunaan melalui *cross crediting for foreign tax credit*. Sedangkan yang dimaksud dengan *sourcing rules for foreign tax credits* adalah aturan yang mengatur tentang sumber penghasilan luar negeri mana saja yang pajak penghasilannya dapat dikreditkan. Karena bila tidak ada aturan pembatasan mengenai sumber penghasilan yang diperbolehkan, hal ini juga memungkinkan disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan rekayasa guna memperoleh keuntungan pajak secara tidak benar. Indonesia belum melakukan pembatasan mengenai hal ini yang berarti merupakan tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membatasi sumber penghasilan yang pajak penghasilan luar negerinya bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa peraturan perpajakan di Indonesia sudah cukup baik dalam mengantisipasi aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* yang menggunakan metode *transfer pricing* dan *cross crediting for foreign tax credits*. Sedangkan untuk aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* yang

menggunakan metode *check the box* tidak perlu diantisipasi, karena peraturan perpajakan di Indonesia tidak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memilih opsi-opsi bentuk entitas yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Namun bila wajib pajak melakukan aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* menggunakan metode *allocation of debt and earnings stripping*, *contract manufacturing*, *hybrid entities*, *hybrid instruments* Indonesia belum mempunyai aturan yang dapat mengantisipasinya. Karenanya perlu dibuat aturan yang dapat mengantisipasi penggunaan metode-metode tersebut. Di samping itu perlu juga dibuat aturan yang menegaskan sumber-sumber penghasilan yang kredit pajak luar negerinya boleh diperhitungkan.

KESIMPULAN

Negara-negara kecil yang tidak mempunyai andalan sumber daya umumnya kesulitan untuk menarik investor guna menanamkan investasinya. Dalam kondisi demikian banyak di antaranya kemudian menggunakan cara yang tidak *fair* untuk menarik investor, yaitu dengan menerapkan tarif pajak rendah atau 0% dan memberikan fasilitas kerahasiaan informasi mengenai profil investor beserta data keuangan dan perpajakannya. Negara-negara yang menerapkan kebijakan ini dinamakan negara *tax haven*. Apa yang dilakukan negara *tax haven* ini memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang merugikan pendapatan pajak banyak negara.

Karena itu praktek perpajakan yang dilakukan negara-negara *tax haven* diperangi oleh pemerintah semua negara di dunia. Penolakan terhadap praktek negara *tax haven* dipelopori oleh OECD yang kemudian menentukan setiap negara harus menggunakan standar perpajakan yang ditetapkan oleh OECD. Melalui berbagai pendekatan akhirnya semua negara termasuk negara-negara *tax haven* telah berkomitmen untuk melaksanakan standar perpajakan internasional yang ditentukan OECD, walaupun belum semua negara *tax haven* yang telah memenuhi komitmennya secara utuh.

Beberapa metode yang sering digunakan para pelaku kejahatan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional menurut Gravelle (2013) antara lain: *allocation of debt and earnings stripping*, *transfer pricing*, *contract manufacturing*, *check the box*, *hybrid entities*, *hybrid instruments*, *cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*. Undang-Undang perpajakan di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya sudah mampu untuk mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang menggunakan metode *transfer pricing* dan *cross crediting for foreign tax credits*. Tetapi peraturan perpajakan yang ada belum mampu mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang menggunakan metode *allocation of debt and earnings stripping*, *contract manufacturing*, *hybrid entities* and *hybrid instruments* secara sempurna.

SARAN

Untuk dapat mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional secara sempurna, maka peraturan perpajakan di Indonesia perlu disempurnakan lagi khususnya agar mampu mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang menggunakan metode *allocation of debt and earnings stripping*, *contract manufacturing*, *hybrid entities* and *hybrid instruments*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrasinei, Mihai-Bogdan, 2013, *The Problems of Tax Havens and The Romanian Tax Authorities' Reaction*, CES Working Paper, Alexander Ioan Cuza University, Vol. 5, Issue 2 (June), page 149 - 159.
- Desai, Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines Jr., 2004, *Economic Effects of Regional Tax Havens*, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138.
-
- _____, 2006, *The Demand for Tax Haven Operations*, Journal of Public Economics, Vol. 90, page 513 - 531.
- Dharmapala, Dhammika and James R. Hines Jr., 2009, *Which Countries Become Tax Havens?*, Journal of Public Economics, Vol. 93, page 1058 - 1068.

Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id.

Gravelle, Jane G., 2013, *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*, Congressional Research Service Report for Congress.

Hampton, Mark P. and John Christensen, 2002, *Offshore Pariahs? Small Island Economies, Tax Havens and Re-configuration of Global Finance*, World Development, Vol. 30, No. 9, Elsevier Science Ltd., page 1657 - 1673.

Hebous, Shafik, 2011, *Money at The Docks of Tax Havens: A Guide*, CESifo Working Paper No. 3587, Category 1: Public Finance.

Hines, James R., Jr., 2005, *Do Tax Havens Flourish?*, Tax Policy and The Economy, Vol. 19, Editor James M. Poterba, MIT Press, page 65 - 99.

_____, 2007, *Tax Havens*, Working Paper 2007-3, Office of Tax Policy Research, Michigan Ross School of Business.

Hishikawa, Akiko, 2002, *The Death of Tax Havens?*, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 25, Issue 2, Symposium: Globalization & The Erosion of Sovereignty in Honor of Professor Lichtenstein.

Jansky, Petr and Alex Prats, 2013, *Multinational Corporations and The Profit Shifting Lure of Tax Havens*, Christian Aid Occasional Paper Number 9.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tanggal 8 Maret 1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Knipe, Patrick J., Judson P. Stryker and Betty Thorne, 2009, *Earnings Stripping Under Section 163(j) Status Quo Vadis?*, International Business: Research Teaching and Practice 3(1).

KPMG, 2012, *Japanese Earnings Stripping Rules*, KPMG Japan Tax Newsletter.

- Maffini, Giorgia, 2009, *Tax Haven Activities and The Tax Liabilities of Multinational Groups*, Oxford University Centre for Business Taxation.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 1998, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 2000, *Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, Report to The 2000 Ministerial Council Meeting and Recommending by The Committee on Fiscal Affairs*.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 2010, *Promoting Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, A Background Information Brief*.
- Orlov, Mykola, 2004, *The Concept of Tax Haven: A Legal Analysis*, Intertax, Vol. 32, Issue 2, page 95 – 111.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

- Rosenzweig, Adam H., 2010, *Why are There Tax Havens?*, Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 10-11-03, School of Law, Washington University in St. Louis.
- Siahaan, Richard Pardomuan Parulian, 2010, *Analisis Kebijakan Penangkal Praktik Thin Capitalization di Indonesia*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Slemrod, Joel and John D. Wilson, 2009, *Tax Competition with Parasitic Tax Havens*, Journal of Public Economics, Vol. 93, page 1261-1270.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing*.
- Tax Justice Network, 2007, *Identifying Tax Havens and Offshore Finance Centres*, accessed on May 2013, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, TINGKAT
PERTUMBUHAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP
STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG GO PUBLIC
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Susiani

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Kartini Surabaya
Jalan Raya Nginden 19-23, Surabaya

ABSTRACT

One of important decisions on financial management is financing decision. The decision will be contact with how to determine the optimal capital structure. On these problem, each of financial manager very necessary to make consideration about factors will be influence of capital structure. The objective of the research is to analyze the influence of factors, among other things : asset structure, growth rate and profitability of the firms. Population of this research are all of food & beverage company listed at Bursa Efek Indonesia (BEI). The sample includes ten companies registered at BEI. The data analysis instrument employed was multiple regression analysis, F-test and t-test. The results of the research indicate that the factors of the capital structure determiners which have significant effect on capital structure, according to simultantly are assets structure, growth rate and profitability. And according to partially that only profitability which have significant effect on capital structure, but assets structure and growth rate which do not give significant effect on capital structure.

Keywords: *capital structure, assets structure, growth rate and profitability*

PENDAHULUAN

Struktur modal (*capital structure*) adalah bagian dari struktur keuangan (*financial structure*). Dalam neraca, struktur keuangan tercermin pada keseluruhan passiva, sedangkan struktur modal tercermin hanya pada pos hutang jangka panjang dan pos equitas (modal sendiri), yang mana keduanya ini merupakan dana yang bersifat permanen atau jangka panjang sebagaimana yang

telah dinyatakan oleh Riyanto (2001) bahwa struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi struktur modal tidak mencerminkan hutang lancar (hutang jangka pendek).

Membicarakan perihal struktur modal adalah sangat penting, hal ini mengingat baik buruknya struktur modal bagi setiap perusahaan akan berdampak langsung terhadap posisi financial perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka manager keuangan setiap perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan menurut Weston and Brigham (1999) antara lain adalah struktur aktiva (*structure of assets*), tingkat pertumbuhan (*growth rate*) dan profitabilitas (*profitability*).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI pada periode 2006-2009?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Struktur Modal dan Struktur Keuangan

Dalam pembahasan mengenai struktur modal, maka yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan modal berdasarkan jenisnya, karena persoalan struktur modal adalah persoalan penentuan komposisi antara modal asing yang berupa hutang jangka panjang dan modal sendiri. Akan tetapi struktur modal mempunyai hubungan dengan struktur keuangan atau struktur financial. Hal ini disebabkan struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan.

Sebagaimana pendapat Weston and Brigham (1999) pengertian struktur keuangan adalah cara bagaimana perusahaan membiayai aktivitasnya. Struktur keuangan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca, yaitu terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham. Struktur modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan permanent yang terdiri dari

hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Jadi struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Riyanto (2001) juga berpendapat bahwa struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, dimana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang.

Sedangkan menurut Sartono (2001) struktur modal ditunjukkan oleh perimbangan pembelanjaan jangka panjang yang permanen, yaitu perimbangan antara hutang jangka panjang dan saham preferen dengan modal sendiri diluar hutang jangka pendek. Modal sendiri termasuk modal saham biasa, *capital* surplus dan laba ditahan.

Secara umum struktur modal adalah susunan atau perbandingan antara modal sendiri dan pinjaman jangka panjang. Dengan perkataan lain struktur modal memperlihatkan bagaimana modal perusahaan terbagi antara *equity* dan *long term debt*, sedangkan struktur keuangan perusahaan menunjukkan komposisi sebelah kanan neraca perusahaan. Jadi secara keseluruhan sebelah kredit neraca perusahaan terbagi ke dalam pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan modal sendiri.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri.

Pengukuran Struktur Modal

Struktur modal dapat diukur berdasarkan pada pengertian struktur modal yang antara lain disampaikan oleh Riyanto (2001) yaitu bahwa struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, yang mana rasio tersebut sering dikenal dengan sebutan *long-term debt to equity* dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Struktur Modal} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal

Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Agar dapat menentukan komposisi struktur modal yang optimal maka manajemen keuangan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal sebelum menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal.

Menurut pendapat Weston and Brigham (1999) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal antara lain meliputi: struktur aktiva (*structure of assets*), tingkat pertumbuhan (*growth rate*) dan profitabilitas (*profitability*).

1. Struktur Aktiva (*Structure of Assets*)

Membahas struktur aktiva suatu perusahaan, tidak lain adalah membahas tentang komposisi dari aktiva perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, komposisi aktiva perusahaan merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan di dalam usaha mengatur tingkat resiko financial yang bersangkutan dengan permodalannya sebagaimana halnya pada pos passiva neraca yang menggambarkan sumber-sumber pemodalan (dana) dari pihak siapa perusahaan itu memperoleh modalnya.

Dinyatakan oleh Weston and Brigham (1999) bahwa perusahaan yang aktivanya cocok untuk dijadikan anggunan kredit, maka perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan banyak hutang. Aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan merupakan anggunan yang baik. Sedangkan aktiva yang hanya digunakan untuk hal-hal tertentu merupakan anggunan yang tidak baik, karena itu perusahaan pupuk biasanya mempunyai *laverage* tinggi, sedangkan perusahaan yang berkecimpung dalam teknologi lazimnya menggunakan jumlah hutang yang relatif kecil. Riyanto (2001) juga berpendapat bahwa :

“....Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap (*fixed assets*) akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, sedangkan modal luar sifatnya hanya sebagai pelengkap”.

Hal ini mengikuti kebijaksanaan keuangan konservatif yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri paling sedikit harus dapat menutup jumlah aktiva tetap dan aktiva lain yang sifatnya permanen.

Selanjutnya untuk menentukan komposisi atau struktur aktiva, maka dikatakan oleh Riyanto (2001) bahwa struktur aktiva merupakan perbandingan atau perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap atau dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{Struktur Aktiva} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Aktiva Tetap}} \times 100\%$$

Adapun yang dimaksud dengan aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun). Sedangkan yang dimaksudkan dengan aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Ditinjau dari lamanya perputaran, aktiva tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun).

2. Tingkat Pertumbuhan (*Growth Rate*)

Pertumbuhan bagi suatu perusahaan merupakan sesuatu yang harus dimaksimalkan. Bila pertumbuhan perusahaan meningkat maka pangsa pasar atau ekspansi perusahaan selanjutnya memerlukan modal dalam jumlah yang besar. Apabila modal atau dana yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi maka perusahaan harus mencari tambahan untuk keperluan tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut maka Weston and Brigham (1999) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada modal eksternal. Mengenai hal ini Riyanto (2001) juga menyatakan pendapatnya bahwa pada waktu perusahaan merencanakan

pemenuhan kebutuhan modal adalah sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik, apakah perusahaan akan mengeluarkan saham atau obligasi. Dan penarikan obligasi (hutang) hanya dibenarkan apabila tingkat bunganya lebih rendah daripada *earning power* dari tambahan modal tersebut. Dengan demikian apabila pada waktu akan menarik hutang, tingkat bunganya tinggi maka perusahaan cenderung mengurangi jumlah hutang sehingga memperkecil struktur modal, begitu pula sebaliknya.

Menurut Riyanto (2001) sebagian besar dari aktivanya sendiri dan aktiva lancar akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dengan mengutamakan kebutuhan dananya melalui hutang sehingga dapat memperbesar struktur modal, sedangkan perusahaan yang lambat pertumbuhannya lebih sedikit menggunakan hutang sehingga memperkecil struktur modal perusahaan.

Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan konservatif yang horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap ditambah aktiva lain yang sifatnya permanen.

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan perusahaan maka dinyatakan oleh Huang and Song (2005) bahwa tingkat pertumbuhan dapat ditinjau dari indeks kenaikan aktiva yang tercermin pada laporan keuangan dimana kenaikan aktiva ini merupakan perbandingan antara total aktiva tahun berjalan dan total aktiva tahun sebelumnya dengan total aktiva tahun sebelumnya atau dapat ditulis sebagai berikut:

$$I = \frac{P_n - (P_n - 1)}{P_n - 1} \times 100\%$$

Dimana :

I = Indeks kenaikan aktiva

P_n = Total aktiva tahun ke-n

P_{n-1} = Total aktiva tahun sebelumnya (n-1)

3. Profitabilitas (*Profitability*)

Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun salah satunya adalah dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tiap tahunnya, maka dipergunakan suatu metode dan analisisnya. Dengan metode dan analisis tersebut data perusahaan menjadi bisa dimengerti.

Adapun metode dan analisis tersebut menggunakan rumus :

$$ROI = \frac{EAT}{\text{Total Aktiva}}$$

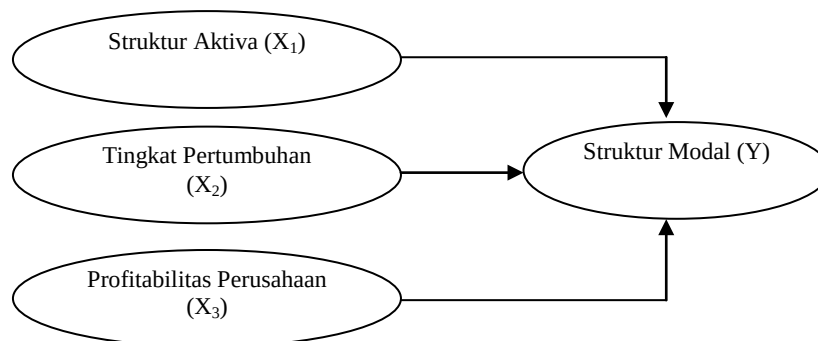
Keterangan :

ROI : *Rate On Investment*

EAT : *Earning After Tax*

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

1. Diduga struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI Periode 2006 – 2009.

2. Diduga struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI periode 2006 – 2009.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis dengan metode statistik melalui model regresi linier berganda, dan setelah data dianalisis, maka akan diperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Identifikasi Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi :

1. Variabel Bebas (X) yang terdiri dari :

X_1 = Struktur Aktiva

X_2 = Tingkat Pertumbuhan

X_3 = Profitabilitas Perusahaan

2. Variabel Terikat (Y)

Y = Struktur Modal

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1. Struktur Aktiva (X_1) adalah rasio perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tidak lancar dari masing-masing perusahaan makanan dan minuman di BEI yang menjadi sample dalam penelitian ini selama periode 2006 – 2009. yang diukur dengan satuan persen dan dihitung dengan rumus :

$$\text{Struktur Aktiva} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Aktiva Tidak Lancar}} \times 100\%$$

2. Tingkat Pertumbuhan (X_2) adalah tingkat pertumbuhan total aktiva dari tahun ke tahun dari masing-masing perusahaan makanan dan minuman di BEI yang

menjadi sampel dalam penelitian ini selama periode 2006 – 2009, yang diukur dengan satuan persen, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TPP = \frac{\text{Total Aktiva Tahun } n - \text{Total Aktiva Tahun } n-1}{\text{Total Aktiva Tahun } n-1} \times 100\%$$

Keterangan :

TPP: Tingkat Pertumbuhan Perusahaan

3. Profitabilitas Perusahaan (X_3) adalah rasio perimbangan antara laba bersih setelah dikurangi pajak dengan total aktiva dari masing-masing perusahaan makanan dan minuman di BEI yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama periode 2006 – 2009 yang diukur dengan satuan persen, dengan menggunakan rumus:

$$ROI = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. Struktur Modal (Y) adalah rasio perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri dari masing-masing perusahaan makanan dan minuman di BEI yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama periode 2006 – 2009, yang diukur dengan satuan persen dan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Struktur Modal} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2006) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di Bursa Efek Indonesia.

Sampel menurut Sugiyono (2006) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan ciri-ciri tertentu yaitu neraca akhir dan laporan laba rugi perusahaan makanan dan minuman yang *go*

public di Bursa Efek Indonesia Periode 2006 – 2009 yang berjumlah 10 perusahaan, yaitu : 1. PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk ; 2. PT. Caha Kalbar, Tbk ; 3. PT. Davomas Abadi, Tbk ; 4. PT. Delta Djakarta, Tbk ; 5. PT. Fast Food Indonesia, Tbk ; PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk ; 7. PT. Mayora Inda, Tbk ; 8. PT. SMART, Tbk ; 9. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk ; 10. PT. Ultra Jaya Milk, Tbk.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan sumber data yang didapat yaitu sumber yang berasal dari *Indonesian Capital Market Directory* Tahun 2008 dan 2010.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan rumus umum sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Struktur Modal
X ₁	= Struktur Aktiva
X ₂	= Tingkat Pertumbuhan
X ₃	= Profitabilitas Perusahaan
β ₀	= Konstanta
β ₁ ...β ₂	= Koefisien Regresi
e	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Model

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Multikolinieritas

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya suatu gejala multikolinieritas terhadap variable-variabel bebas dalam penelitian ini, maka dilakukan uji statistik yaitu dengan menghitung koefisien factor variasi inflasi (*Variance Inflation Factor*),

sering disingkat dengan VIF. Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Uji Multikolinieritas
coefficien^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Struktur Aktiva	.817	1.224
Tingkat Pertumbuhan	.970	1.030
Profitabilitas	.798	1.254

a. Dependent variable : struktur modal

Berdasarkan perhitungan, sebagaimana yang tertera pada tabel 1, maka dapat diketahui bahwa nilai VIF dari seluruh variable bebas menunjukkan koefisien VIF yang lebih kecil dari 10. Hal ini berarti, bahwa seluruh variable bebas pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

b. Heterokedastisitas

Untuk mengidentifikasi ada / tidaknya hubungan antara nilai residual dengan variable-variabel bebas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara menghitung korelasi rank spearman. Tabel 2 berikut ini, menyajikan hasil perhitungan rank spearman yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Heterokedastisitas Dengan Korelasi Rank Spearman
Nonparametric Correlations

Correlations					
			Struktur Aktiva	Tingkat Pertumbuhan	Profitabilitas
Spearman's rho	Struktur Aktiva	Correlation Coefficient	1.000	.089	.538**
		Sig. (2-tailed)	.	.587	.000
		N	40	40	40
	Tingkat Pertumbuhan	Correlation Coefficient	.089	1.000	.213
		Sig. (2-tailed)	.587	.	.187
		N	40	40	40
	Profitabilitas	Correlation Coefficient	.538**	.213	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.187	.
		N	40	40	40
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.026	.177	.417**
		Sig. (2-tailed)	.876	.274	.008
		N	40	40	40

** . Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Dari Tabel 2 dengan jelas dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas untuk semua variable menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini akan memberikan arti bahwa seluruh variable bebas pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Autokorelasi

Untuk mengidentifikasi apakah terjadi autokorelasi atau tidak, maka digunakan uji Durbin Watson, yakni dengan cara membandingkan koefisien Durbin Watson (DW) dengan nilai terbatas. Apabila nilai DW terletak di antara -2 dan +2 maka model tidak terjadi gejala autokorelasi. Tabel 3 berikut ini menyajikan hasil uji Durbin Watson sebagai berikut :

Tabel 3
Penentuan Nilai Durbin Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.744 ^a	.553	.516	72.7972	1.321

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan, Struktur Aktiva,

b. Dependent Variable: Struktur Modal

Dari Tabel 3 tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson menunjukkan angka 1,321. Hal ini berarti terletak pada interval antara -2 dan +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

2. Persamaan Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikatnya. Tabel 4. berikut ini berisi ringkasan hasil perhitungan dengan metode regresi linier dimana dari perhitungan tersebut akan diperoleh persamaan dari regresi linier tersebut.

Tabel 4.
Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	187,686	23,502
Struktur Aktiva	-0,155	0,118
Tingkat Pertumbuhan	-0,301	0,439
Profitabilitas	-10,859	2,108
R : 0,744 ^a F _{hitung} : 14,836		
R _{Square} : 0,553 Sig. : 0,000		

a. Dependent variable : struktur modal

Dari Tabel 4. yang menyajikan ringkasan hasil analisis regresi linier berganda akan dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 187,686 - 0,155X_1 - 0,301X_2 - 10,859X_3$$

Interprestasi dari persamaan (model) regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Konstanta (β_0) = 187,686, menunjukkan nilai variable struktur modal (Y) yang tidak dipengaruhi oleh variable struktur aktiva (X_1), variable tingkat pertumbuhan (X_2) dan variable profitabilitas (X_3)
- b) Koefisien regresi variable struktur aktiva (β_1) = -0,155, menunjukkan apabila struktur aktiva meningkat sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan struktur modal sebesar -0,155 satuan dengan asumsi variable lainnya konstan.
- c) Koefisien regresi variable tingkat pertumbuhan (β_2) = -0,301, menunjukkan apabila tingkat pertumbuhan perusahaan meningkat sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan struktur modal sebesar -0,301 satuan dengan asumsi variable yang lain konstan.
- d) Koefisien regresi variable profitabilitas (β_3) = -10,859, menunjukkan apabila profitabilitas perusahaan meningkat sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan struktur modal sebesar -10,859 satuan dengan asumsi variable yang lain konstan.

3. Koefisien Korelasi Simultan (R)

Dari analisis regresi linier diperoleh nilai koefisien korelasi simultan (R) sebesar 0,744, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variable bebas (struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas) dengan variable terikat (struktur modal) yaitu sebesar 74,4%.

4. Koefisien Determinasi Simultan (R_{Square})

Dari analisis regresi linier diperoleh nilai koefisien determinasi simultan (R_{square}) sebesar 0,553, hal ini menunjukkan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas sebesar 55,3% sedangkan sisanya sebesar 44,7% dijelaskan oleh variable bebas lain diluar model.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent (X) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Y).

Kriteria signifikansi pada uji F adalah jika F hitung yang dihasilkan lebih besar dari F table dan dengan tingkat signifikansi probabilitas kesalahan dibawah 0,05 atau 5% berarti semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika F hitung yang dihasilkan lebih kecil dari F tabel dan dengan tingkat probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 berarti semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Tabel 5 berikut ini menunjukkan hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji F

Model Anova	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	235.865,2	3	78.621,729	14,836	0,000 ^a
Residual	190.779,8	36	5.299,434		
Total	426.644,8	39			

Predictors : (Constant), profitabilitas, tingkat pertumbuhan, struktur aktiva
Dependent variable : struktur modal

Berdasarkan hasil uji F (tabel V) telah ditunjukkan bahwa nilai signifikansi F hitung sebesar 14,836 dengan tingkat probabilitas kesalahan 0,000. Sedangkan nilai F tabel dengan(df pembilang/K dan df penyebut/ n-K-1 yaitu (3;40-3-1) sehingga dapat ditemukan pada tabel F yaitu pada kolom 3 dan baris 36, sehingga dapat diperoleh nilai F tabel sebesar 2,87. Oleh karena F hitung ($14,836 > F \text{ tabel } (2,87)$) dan dengan tingkat probabilitas kesalahan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari struktur aktiva (X_1) , tingkat pertumbuhan (X_2) dan profitabilitas (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu struktur modal (Y).

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen (X) secara parsial (individu) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Tabel 6 berikut ini menunjukkan ringkasan hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 6
Ringkasan Hasil Uji t

Model	t	Sig.	Corelation		
			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	7,986	0,000			
Struktur Aktiva	-1,308	0,199	-0,442	-0,213	0,045
Tingkat Pertumbuhan	-0,685	0,479	-0,200	-0,113	0,013
Profitabilitas	-5,151	0,000	-0,725	-0,651	0,424
T _{tabel} = 0,05/2 = 0,025 ; df = n - k - 1 = 40 - 3 - 1 = 36 ; t _{tabel} = 2,0281					

Dependent variable : struktur modal

Kriteria untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat probabilitas kesalahan $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat probabilitas kesalahan $> 0,05$ maka H_0 diterima berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji t (Tabel 6) dapat dilihat bahwa :

- Uji t untuk variabel struktur aktiva telah diperoleh nilai $t_{hitung} -1,308 > t_{tabel} -2,0281$ dan tingkat probabilitas lebih besar 0,05 maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
- Uji t untuk variabel tingkat pertumbuhan telah diperoleh nilai $t_{hitung} -0,685 > t_{tabel} -2,0281$ dan tingkat probabilitas lebih besar 0,05 maka H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
- Uji t untuk variabel profitabilitas telah diperoleh nilai $t_{hitung} -5,151 < t_{tabel} -2,0281$ dan tingkat probabilitas lebih besar 0,05 maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.

PEMBAHASAN

Berdasar pada hasil perhitungan melalui metode regresi linier berganda telah diperoleh persamaan regresi : $Y = 187,686 - 0,155X_1 - 0,301X_2 - 10,859X_3$. Dari persamaan regresi tersebut telah ditunjukkan oleh adanya nilai koefisien regresi dari masing-masing variable bebas yang berarah negative atau memiliki hubungan yang tidak searah, antara variable struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas dengan variable struktur modal. Jadi apabila struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan struktur modal sebesar nilai koefisien regresi dari masing-masing variable bebas tersebut.

Dari hasil uji F telah diketahui bahwa secara simultan, variable struktur aktiva (X_1), tingkat pertumbuhan (X_2) dan Profitabilitas (X_3) berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (Y). Hal ini sesuai dengan pendapat Weston (1999) dan diperkuat oleh hasil perhitungan yang ditunjukkan dengan nilai $F_{hitung} (14,836) > F_{tabel} (2,87)$ dengan tingkat probabilitas kesalahan model sebesar 0,000 yang berarti probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi α 0,05. sehingga dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan : “Diduga struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI Periode 2006 – 2009”, diterima atau terbukti kebenarannya.

Adapun besarnya hubungan antara struktur aktiva (X_1), tingkat pertumbuhan (X_2) dan profitabilitas (X_3) adalah sangat kuat yaitu sebesar 0,744. Selanjutnya struktur modal (Y) dapat dijelaskan oleh variable struktur aktiva (X_1), tingkat pertumbuhan (X_2) dan profitabilitas (X_3) dengan kontribusi sebesar 0,553 atau sebesar 55,3%. Sedang sisanya 44,7% dipengaruhi oleh variable lain diluar model yang diteliti.

Berdasarkan uji t, dapat diketahui bahwa (1) variable struktur aktiva (X_1) dan variable tingkat pertumbuhan (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. variable struktur aktiva (X_1) sebesar 0,199 dengan nilai $t_{hitung} -1,308$ dan nilai sig. variable

tingkat pertumbuhan (X_2) sebesar 0,497 dengan nilai t_{hitung} -0,685. Oleh karena kedua variable bebas tersebut memiliki nilai sig. lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan lebih besar dari t_{tabel} (-2,0281), maka H_0 diterima, sehingga secara parsial kedua variabel bebas tersebut tidak berpengaruh terhadap struktur modal. (2) variable profitabilitas (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,000 dengan nilai t_{hitung} -5,151. Dengan demikian dapat diketahui bahwa variable profitabilitas (X_3) memiliki nilai sig. lebih kecil dari tingkat sig. $\alpha = 0,05$ dan lebih kecil dari t_{tabel} (-2,0281), sehingga H_0 ditolak. Oleh karena hanya variable profitabilitas (X_3) yang berpengaruh signifikan terhadap variable struktur modal (Y), sedangkan variable struktur aktiva (X_1) dan variable tingkat pertumbuhan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (Y) maka hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini. “Diduga struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI periode 2006 – 2009”, ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.

KESIMPULAN

Telah diperoleh beberapa informasi yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara simultan struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI periode 2006 – 2009.
2. Bahwa hubungan antara struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan dengan struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI periode 2006 – 2009 yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah sangat kuat yaitu telah ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,744 atau sebesar 74,4%.
3. Bahwa struktur modal dari perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI periode 2006 – 2009, yang menjadi sample dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh struktur aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas

perusahaan dengan kontribusi sebesar 0,553 atau 55,3% sedangkan yang 44,7% dijelaskan oleh variabel bebas yang belum dianalisis dalam model penelitian ini.

4. Bahwa secara parsial struktur aktiva dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh sig. terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang *go public* di BEI periode 2006 – 2009 yang menjadi sample dalam penelitian ini. Sedangkan untuk variable profitabilitas secara parsial menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

SARAN

Bagi peneliti lain yang bermaksud mengembangkan penelitian ini lebih lanjut hendaknya dapat menambah variabel bebas lain dan menambah observasinya, sehingga hasilnya akan lebih representatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Huang, Samuel Gui Hai and Frank M. Song, 2005, *The Determinants of capital structure : Evidence from China*, China Economics Review 17, 14-36
- Institute For Economic and Financial Research, 2008 dan 2010, *Indonesia Capital Market Directory*, Bursa Efek Indonesia.
- Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesembilan, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sartono, R. Agus, 2001, *Manajemen Keuangan*, BPFE, Jogjakarta.
- Weston JF and Brigham E.F, 1999, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jilid Pertama, Edisi Kesembilan (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta.

**ANALISIS FASHION INVOLVEMENT DAN EMOSI POSITIF
TERHADAP IMPULSE BUYING PADA MATAHARI
DEPARTMENT STORE SURABAYA**

Thyophoida Wanty Suryani Panjaitan

Maria Widyastuti

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

Nowadays more and more women are found working, it will also change the shopping style of the women, especially in the world of fashion (clothing) is not an exception in the event of pemberan discount programs, such as the anniversary of the city of Surabaya then we can see a lot of customers visit, especially the female consumer. Changes in shopping style is one effect that caused by working world that make people always want to look up to date in fashion. It is one of the triggers of consuments to buy out of plan, where it occurs outside of consciousness due to a moment of emotion when viewing the product and interesting that displayed on store outlets. The purpose of this study is to find out the influence of fashion involvement and partial positive emotions on the Impulse Buying at the Matahari Department Store Surabaya.

Keywords: *fashion involvement, emotion positif, impulse buying*

PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin banyak ditemui wanita yang bekerja, hal tersebut juga akan merubah gaya belanja dari para wanita terutama dalam dunia *fashion* (pakaian) tidak terkecuali pada saat terjadi program pemberian *discount*, misal pada ulang tahun kota Surabaya maka dapat kita lihat banyak konsumen yang melakukan kunjungan terutama konsumen wanita. Perubahan gaya belanja tersebut salah satunya disebabkan oleh tuntutan dunia kerja yang selalu berusaha berpenampilan *up to date*

dalam berbusana. Hal tersebut yang menjadi salah satu pemicu konsumen melakukan pembeli barang di luar rencana semula, walaupun sebelumnya sudah dilakukan perencanaan terhadap barang yang akan dibeli tetapi pada akhirnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang direncanakan, dimana hal tersebut terjadi di luar kesadaran akibat emosi sesaat saat melihat produk terbaru dan menarik yang terpajang pada *outlet-outlet* toko

Bagi konsumen yang tidak terbiasa membuat daftar barang yang hendak dibeli, menyebabkan potensi terjadinya belanja di luar rencana jauh lebih besar. Perkembangan dunia *fashion* yang semakin cepat berganti dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya *impulse buying*. *Impulse buying* merupakan salah satu fenomena umum yang sering ditemui pada pembeli/konsumen wanita, khususnya wanita pekerja mempunyai kecenderungan psikologis yang lebih tinggi membandingkan produk, melihat-lihat produk lain sebelum memutuskan membeli barang yang telah direncanakan. *Impulse buying* adalah perilaku pembeli belanja barang di luar rencana, bisa jadi, pembeli terpengaruh paparan iklan yang ia tonton sebelumnya, keinginan untuk coba-coba barang baru, kemasan yang atraktif, *display* yang menonjol, harga yang murah atau bujukan *sales promotion girl*.

Semakin banyaknya jumlah wanita bekerja di Surabaya akan menyebabkan semakin meningkatkan potensi pasar produk kebutuhan wanita bekerja, salah satunya pakaian. Selain itu, waktu yang dimiliki untuk berbelanja semakin sedikit, hal tersebut dikarenakan sebagian besar waktunya bekerja, dengan terbatasnya waktu yang dimiliki maka akan memicu terjadinya *impulse buying*.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka peneliti di sini dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah *fashion involvement* dan emosi positif berpengaruh secara simultan terhadap terjadinya *impulse buying* pada Matahari Departemen Store Surabaya?
2. Apakah *fashion involvement* dan emosi positif berpengaruh secara parsial terhadap terjadinya *impulse buying* pada Matahari Departemen Store Surabaya?

LANDASAN TEORI

Pengertian Perilaku Konsumen

Menurut Loudon and Bitta dalam Suryani (2008: 7) perilaku konsumen mencakup proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen secara fisik dalam pengevaluasian, perolehan penggunaan atau mendapatkan barang dan jasa. Utami (2010: 45) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlihat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan perilaku konsumen sebagai aktivitas/kegiatan yang terkait dengan proses yang dimulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan yang memberikan determinasi dengan perhatian perilaku konsumen yang tidak hanya terletak pada setiap kegiatan yang terjadi pada saat dilakukan pembelian, tapi pada aspek lain disaat sebelum dan sesudah terjadinya pembelian oleh konsumen.

Terdapat tiga perspektif dalam perilaku konsumen, yaitu:

1. Perspektif pengambilan keputusan

Menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. Langkah-langkat tersebut termasuk pengenalan masalah, mencari, evaluasi alternatif, memilih dan evaluasi pasca perolehan.

2. Perspektif pengalaman

Pengklasifikasian berdasarkan perspektif pengalaman menyatakan bahwa pembelian akan dilakukan karena dorongan hati dan mencari variasi.

Ada 2 jenis pembelian yang dapat diteliti dari perspektif pengalaman:

- a. Pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman.
- b. Pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau *impulsive*.

3. Perspektif pengaruh perilaku

Mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus terlebih dahulu membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Melakukan Pembelian

Sangat penting bagi seorang manajer pemasaran untuk memahami perilaku berbelanja konsumen, khususnya konsumen wanita. Menurut Kotler and Keller (2007: 214-222) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, antara lain:

1. Faktor Budaya.

Budaya, sub budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub budaya yang lebih meampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Sub budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan wilayah geografis. Kelas sosial memiliki beberapa ciri, yaitu orang-orang yang berada dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku sama, mereka merasa menempati posisi yang inferior atau superior di kelas sosialnya, kelas sosial ditandai oleh sekumpulan variabel seperti pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan, pendidikan dan orientasi nilai.

2. Faktor Sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status soasial. Kelompok acuan merupakan sekelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap sikap dan perilaku. Individu dipengaruhi oleh kelompok acuan melalui cara, yaitu: kelompok acuan membuat seseorang berperilaku dan gaya hidup baru serta mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang, dan kelompok acuan akan menuntut orang mengikuti kebiasaan kelompok sehingga akan mempengaruhi akan pilihan produk dan merek.

3. Faktor Pribadi.

Karakteristik pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli.

Keputusan pembelian dilakukan dengan melakukan analisa menyeluruh baik dari segi kultural maupun psikologis yang mana mencakup seluruh aspek yang ada pada pribadi individu. Meskipun pendekatan ini sangat luas namun mampu memberikan keterangan yang jelas mengenai unsur utama pemasaran yaitu konsumen. Schiffman dan Kanuk (2008) dalam Panjaitan (2011) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai tiga tahap yang berbeda namun tetap berhubungan:

1. *Input*: input mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk dan terdiri atas dua sumber informasi utama
 - a. Usaha pemasaran perusahaan, yaitu kegiatan-kegiatan perusahaan yang mencoba menjelaskan kepada konsumen potensial mereka mengenai keuntungan dari produk dan jasa mereka melalui pemaksimalan produk, promosi, harga dan saluran distribusi.
 - b. Pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen, yaitu masukan-masukan non komersial yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, misalnya pendapat dari teman atau editorial dari suatu surat kabar.
2. *Process*: komponen proses dari suatu model menyangkut bagaimana konsumen mengambil keputusan. Proses ini terdiri dari tiga tahap
 - a. Pengakuan atas kebutuhan atau masalah, yaitu proses pembelian yang dimulai ketika konsumen memiliki suatu kebutuhan atau masalah.
 - b. Pencarian sebelum pembelian, yaitu proses mencari informasi tentang segala atribut produk oleh konsumen.
 - c. Evaluasi dari berbagai alternatif, yakni proses dimana konsumen menganalisis atribut produk yang akan dibeli, seperti warna, selera, kualitas

dan prestise. Setelah itu konsumen akan mempertimbangkan dan menentukan produk mana yang akan mampu memenuhi kebutuhan.

3. *Output* adalah hasil akhir dari model pengambilan keputusan pembelian, yang meliputi :

- a. Perilaku membeli, yaitu saat dimana konsumen akan menentukan produk yang akan dibeli baik sekarang maupun di masa mendatang
- b. Evaluasi setelah membeli, yakni saat konsumen mengevaluasi produk yang telah dibeli dan dikonsumsi, jika konsumen terpuaskan oleh produk tersebut maka pasti konsumen tersebut akan membeli lagi dan jika tidak puas maka konsumen akan mencari produk alternatif.

Dalam masyarakat yang berbudaya terdapat kelas-kelas sosial yang mempunyai ciri tetap dan teratur dari masyarakat. Kelas sosial dapat menunjukkan dan mempengaruhi pandangan pilihan, dan perilaku pembelian pada obyek tertentu. Kelas sosial merupakan suatu kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan para anggota dalam tiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama.

Sebagai makhluk sosial manusia sejak lahir selalu menjadi satu dengan manusia yang lain serta berinteraksi dan menjadi satu dengan alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga timbul kelompok social yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil suatu tindakan.

Bentuk-bentuk kelompok sosial dibedakan menjadi 4, yaitu:

1. Kelompok yang berhubungan langsung, di mana anggota kelompok tersebut saling mengenal secara erat dan memiliki pengaruhnya langsung terhadap pendapat dan selera seseorang.
2. Kelompok primer dan kelompok sekunder, dimana kelompok primer ini ditandai dengan adanya saling mengenal diantara anggota dan kerjasama secara erat dan bersifat pribadi. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, yang anggotanya tidak saling mengenal secara pribadi serta tidak begitu langgeng.

3. Kelompok formal dan kelompok informal, dimana kelompok formal merupakan kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan tegas yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antara anggota. Sedangkan kelompok informal merupakan kelompok bebas yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu.
4. Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok referensi ini juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertindak laku. Anggota-anggota kelompok ini sering menjadi penyebar pengaruh dalam hal selera dan hobi.

FASHION INVOLVEMENT

Involvement adalah suatu sistem metrik yang sangat menolong untuk menjelaskan perilaku konsumen dan segmen pasar. *Involvement* adalah minat atau bagian motivasional yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu dan ditunjukkan oleh ciri penampilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *involvement* adalah suatu interaksi antara konsumen dengan produk (Zakiar, 2010).

Dalam kegiatan pemasaran *fashion*, *fashion involvement* mengacu pada ketertarikan seseorang terhadap produk *fashion* (misalnya pakaian, sepatu), di mana biasanya konsumen selalu tertarik untuk melakukan pembelian karena model yang terbaru dan menarik dan hal inilah yang biasanya menimbulkan terjadinya *impulsive buying* (pembelian tak terencana). Selain itu *fashion involvement* biasanya juga digunakan untuk meramal tingkah laku konsumen yang berhubungan dengan pembelian, dari segi perilaku pada saat melakukan pembelian dan karakteristik konsumen serta produk itu sendiri.

MOTIF BELANJA KONSUMEN

Menurut Utami (2010: 46) motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Di mana motif

yang ada pada diri seseorang akan membangkitkan dan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kepuasan.

Dalam perannya secara langsung, motif mempunyai beberapa fungsi penting untuk mengarahkan konsumen, yaitu:

1. Motif primer adalah suatu motif yang menimbulkan pemilihan terhadap kategori umum suatu produk tertentu. Motif ini antara lain keinginan untuk menikmati kesenangan, motif untuk ingin tahu serta kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain.
2. Motif selektif adalah suatu motif yang mempengaruhi keputusan pembelian yang menyangkut model, dan merek dari kelas-kelas suatu produk.
3. Motif rasional adalah satu motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu produk terhadap konsumen. Sikap belanja yang rasional biasanya dipengaruhi oleh alasan rasional dalam pikiran seorang konsumen
4. Motif emosional adalah suatu motif yang menyebabkan pemilihan yang berkaitan dengan perasaan individu atau pengalaman masa lalu seseorang. Motivasi emosional adalah motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan perasaan baik itu keindahan, gengsi, atau perasaan lainnya termasuk iba dan rasa marah.

Beberapa hal yang selalu menjadi pertimbangan pembelian konsumen, menyangkut:

1. Lokasi penjualan yang strategis, pelayanan yang baik, tempat persediaan yang mudah dicapai dan tidak ramai.
2. Harga.
3. Service yang ditawarkan.
4. Toko yang menarik.
5. Kemampuan tenaga penjualan.

Kotler and Keller (2007) mengemukakan bahwa pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama, yaitu:

1. Motivasi

Beberapa kebutuhan bersifat *biogenis*; kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman. Kebutuhan yang lain bersifat *psikogenis*; kebutuhan itu muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Kebutuhan akan menjadi motif bagi seseorang jika didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai. Motif yang ada pada seseorang akan diwujudkan dalam suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai kepuasan.

2. Persepsi

Adalah proses yang digunakan oleh seseorang individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.

3. Pembelajaran

Merupakan perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil dari belajar, dimana pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, tanggapan dan penguatan. Pendorong adalah rangsangan internal kuat yang mendorong tindakan. Sedang isyarat adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana dan bagaimana tanggapan seseorang.

4. Memori

Semua informasi dan pengalaman yang dihadapi orang ketika mereka mengarungi hidup dapat berakhir dalam jangka panjang. memori dibagi menjadi memori jangka pendek dan memori jangka panjang.

Selain itu faktor kepribadian secara umum merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang. Dalam sehari-hari bila seseorang dianggap memiliki kepribadian, biasanya orang tersebut memiliki beberapa ciri yang diperlihatkan secara lahir (nyata), seperti konsisten dan

konsekuensi dalam perilakunya, sehingga tampak orang tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Kepribadian dapat diidentifikasi sebagai pola sikap individu yang dapat menentukan tanggapan dan cara untuk bertindak laku.

Impulse Buying

Perilaku pembelian yang tidak direncanakan merupakan perilaku pembelian yang dilakukan didalam toko, di mana pembelian berbeda dari apa yang telah direncanakan oleh konsumen pada saat masuk ke dalam toko. Pembelian tidak terencana adalah suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko. Pembelian tak terencana bisa terjadi ketika konsumen tidak familier dengan tata ruang toko, dibawah tekanan waktu, atau seseorang yang teringat akan kebutuhan untuk membeli sebuah unit ketika melihat pada rak di toko.

Menurut Utami (2010: 51) pembelian tak terencana dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. *Reminder purchases*

Merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu di dalam toko dan teringat bahwa produk atau merek tersebut dibutuhkan.

2. *Impulse purchases*

Terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya, biasanya karena adanya rangsangan yang menarik dari toko tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perilaku pembelian tak terencana, yaitu:

1. Penggunaan daftar belanja (*shopping list*)

Daftar belanja adalah sebuah daftar tertulis dari barang-barang yang akan dibeli pada saat akan berbelanja, atau daftar dari unit-unit barang yang disadari atau diminta.

2. Pilihan toko

Beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam memilih toko:

- a. Lokasi toko
- b. Kemudahan transportasi
- c. Jam operasional toko
- d. Komposisi toko

Beberapa peneliti pemasaran beranggapan bahwa *impulse* sinonim dengan *unplanned* ketika para psikolog dan ekonom memfokuskan pada aspek irasional atau pembeli *impulse* murni. Ketika terjadi *impulse buying* akan memberikan pengalaman emosional lebih dari pada rasional, sehingga tidak dilihat sebagai suatu sugesti, dengan dasar ini maka pembelian *impulse* lebih dipandang sebagai keputusan rasional disbanding irasional.

Secara umum perilaku konsumen kita dapat membagi produk menjadi dua bagian yaitu produk yang tergolong *high involvement* dan *low involvement*. Kategori *high involvement* adalah produk yang membutuhkan perhatian khusus sebelum pembeli memutuskan transaksi. Misalnya: komputer, televisi atau mobil. Adapun yang termasuk kategori produk *low involvement* antara lain permen, coklat dan sejumlah makanan ringan, dimana saat membeli produk seperti ini, tentu kita tidak pernah mengecek dengan detail berbagai kandungan bahan yang ada dalam permen..

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. *Fashion involvement* dan emosi positif secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya *impulse buying* pada Matahari Departemen Store Surabaya
2. *Fashion involvement* dan emosi positif secara parsial berpengaruh terhadap terjadinya *impulse buying* pada Matahari Departemen Store Surabaya

METODE PENELITIAN

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah *fashion involvement*, emosi positif, dan *impulse buying* pada Matahari Departemen Store Surabaya. Sampel penelitian adalah konsumen wanita yang berbelanja di Matahari Departemen Store

Delta Plaza Surabaya sebanyak 60 responden. Untuk Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan menggunakan kuesioner dengan skala likert.

Variabel dan definisi operasional variable, sebagai berikut:

- *Fashion involvement* (X1)

Adalah ketertarikan konsumen terhadap terhadap produk *fashion*, dengan indikator: memiliki model terbaru, *fashion* merupakan hal penting guna mendukung aktivitas, menyukai pakaian yang berbeda dengan yang lain serta pakaian menunjukkan karakteristik.

- Emosi positif (X2)

Adalah perasaan yang dirasakan konsumen pada saat berbelanja di Matahari Departemen Store, dengan indikator: kenyamanan, kebanggaan, kemudahan, dan kepraktisan.

- *Impulse buying* (Y)

Adalah proses pembelian yang dilakukan konsumen cenderung secara spontan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu karena adanya keinginan yang kuat untuk membeli, dengan indikator: model terbaru, fitur yg menarik (misal warna), dan selalu mengikuti keluaran terbaru.

Teknik Analisa Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y). Model Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

$Y = impulse\ buying$

$b_0 = konstanta$

$b_1 \dots b_5$ = koefisien regresi

X_1 = *fashion involvement*

X_2 = emosi positif

e = variabel pengganggu, merupakan wakil dari semua faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas baik secara simultan maupun secara parsial terhadap variabel terikat, serta untuk mengetahui variabel bebas yang paling dominan terhadap variabel terikat.

1. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk menguji hipotesis apakah variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk menguji hipotesis apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Analisis Model Regresi Linier Berganda

Berdasarkan penelitian ini, maka persamaan regresi bergandanya dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1.X_1 + b_2X_2 + e$$

maka hasil persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,002 + 0,431 X_1 + 0,301 X_2$$

Berdasarkan model regresi linier berganda ini dapat dijelaskan bahwa :

a. Nilai b_0 sebesar = 1,002

Konstanta sebesar 1,002 menunjukkan bahwa terjadinya *impulse buying* oleh konsumen sebesar 1,002 satuan dengan asumsi seluruh variabel independen (X_1 dan X_2) konstan.

b. Nilai b_1 sebesar = 0,431

Menunjukkan bahwa jika *fashion involvement* (X_1) meningkat sejumlah satu satuan maka, akan meningkatkan *impulse buying* konsumen sebesar 0,431 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain yaitu emosi positif konstan.

c. Nilai b_2 sebesar 0,301

Menunjukkan bahwa jika emosi positif (X_2) meningkat sejumlah satu satuan, maka akan meningkat *impulse buying* sebesar 0,301 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain yaitu *fashion involvement* konstan.

Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Berdasarkan Tabel 1 di bawah ini dapat dikatakan bahwa variabel bebas yakni X_1 dan X_2 , dapat menjelaskan variabel terikat yakni *impulse buying* sebesar R Square (koefisien determinasi) yakni dengan tingkat kesalahan didalam memprediksi sebesar 5% atau sumbangan X terhadap Y sebesar 49,9% dan 50,1% sisanya sebesar dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai R^2 adjusted sebesar 48,2% menunjukkan bahwa keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 48,2% dan 51,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Tabel 1

Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.707 ^a	.499	.482	.88412	2.253

a. Predictors: (Constant), total_x2, total_x1

b. Dependent Variable: total_y

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis 1: Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F

Variabel *fashion involvement* dan emosi positif, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan *impulse buying*.

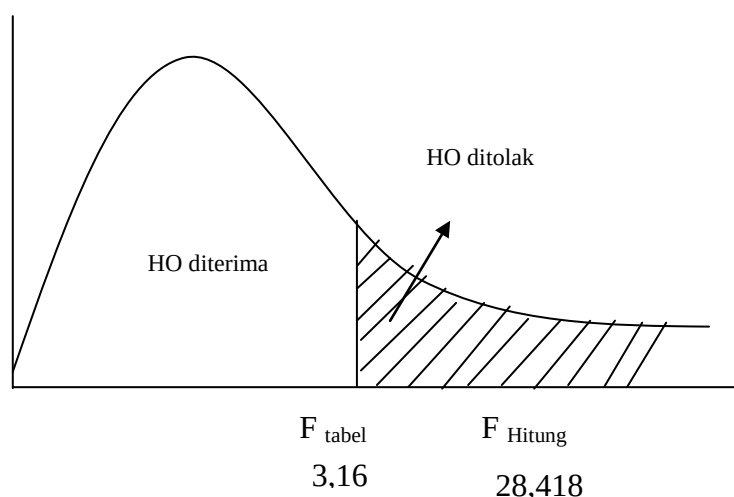
Tabel 2
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44.428	2	22.214	28.418	.000 ^a
	Residual	44.556	57	.782		
	Total	88.983	59			

a. Predictors: (Constant), total_x2, total_x1

b. Dependent Variable: total_y

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 1 di bawah ini dapat dilihat nilai F test sebesar 28,418 lebih besar dari F tabel 3,16 sebesar dan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha yang sudah ditentukan sebesar 5%, ini berarti hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa *fashion involvement* dan emosi positif secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *impulse buying* dapat diterima.



Gambar 1
Kurva Distribusi Uji F

Uji Hipotesis 2: Uji Pengaruh Parsial dengan Uji t

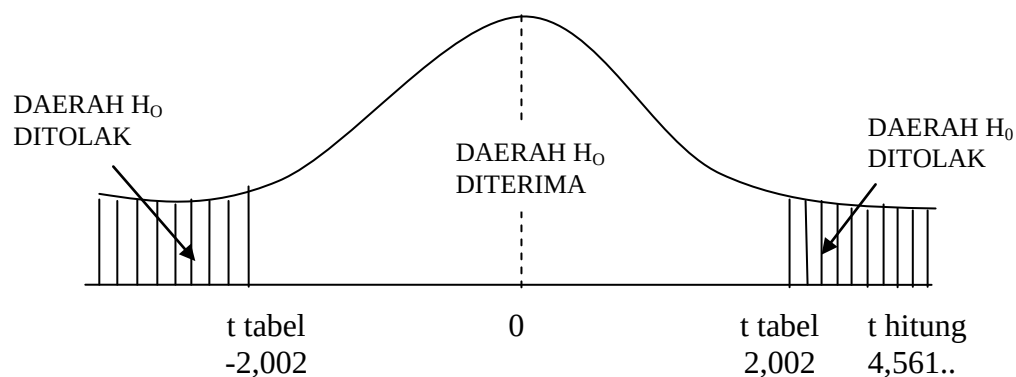
Variabel *fashion involvement* dan emosi positif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *impulse buying*

Tabel 3
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	1.002	1.683		.596	.554
total_x1	.431	.094	.493	4.561	.000
total_x2	.301	.103	.317	2.934	.005

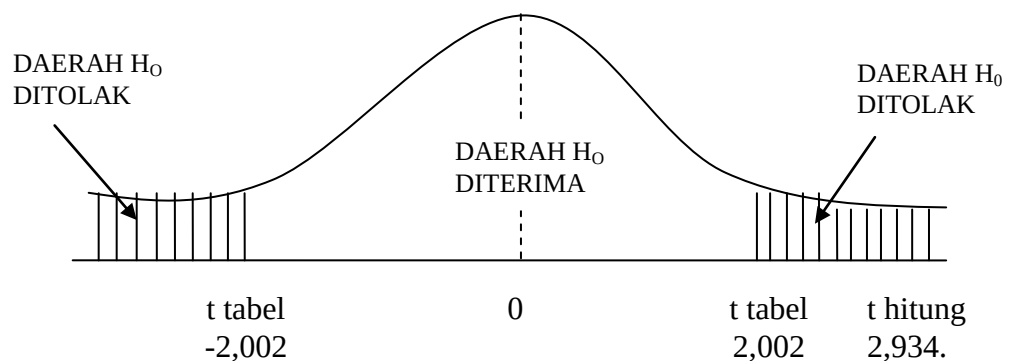
a. Dependent Variable: total_y

Berdasarkan hasil uji t test menunjukkan bahwa variabel *fashion involvement* (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 4,561 lebih besar dari t table sebesar 2,002 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikan (α) yang sudah ditentukan sebesar $0,05/2 = 0,025$, hal ini menunjukkan bahwa variabel *fashion involvement* pengaruh secara signifikan terhadap *impulse buying*.



Gambar 2
Kurva uji t variabel *fashion involvement* (X_1)

Variabel emosi positif (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,934 lebih besar dari t table sebesar 2,002 dengan tingkat signifikan sebesar 0,005 yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikan (α) yang sudah ditentukan sebesar $0,05/2 = 0,025$, hal ini menunjukkan bahwa variabel emosi positif memiliki pengaruh signifikan terhadap *impulse buying*



Gambar 3
Kurva Uji t Variabel Emosi Positif (X_2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 terbukti bahwa baik secara simultan maupun parsial variabel *fashion involvement* dan emosi positif berpengaruh terhadap terjadi *impulse buying* konsumen dalam melakukan pembelian di Matahari Departemen Store di Delta Plaza Surabaya, serta dapat diketahui juga bahwa variabel *fashion involvement* berpengaruh paling dominan dalam menyebabkan terjadinya *impulse buying* pada konsumen.

Hal ini disebabkan, wanita pekerja biasanya sangat memperhatikan penampilan untuk bekerja dan selalu mengikuti model-model terbaru, oleh karena itu biasanya wanita pekerja selalu melakukan pembelian tak terencana pada saat berbelanja di mal

KESIMPULAN

Berdasarkan, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang simultan variabel *fashion involvement* dan emosi positif terhadap terjadinya *impulse buying*. Hal tersebut didasarkan nilai F test sebesar 28,418 dan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikan (α) yang sudah ditentukan sebesar 5%.
- b. Berdasarkan hasil uji t test menunjukkan bahwa *fashion involvement* dan emosi positif berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya *impulse buying* dan *fashion involvement* memiliki pengaruh paling dominan dengan nilai sebesar 4,561 dengan tingkat signifikan 0,000.

SARAN

Berdasarkan hasil analisa diatas maka dapat dikatakan bahwa pembelian tak terencana seringkali terjadi pada saat berbelanja, oleh karena itu untuk menghindarinya perlu dibuat skala prioritas dan perencanaan keuangan yang benar. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama sebaiknya menambah variabel pemberian *discount*, untuk melihat apakah dengan adanya pemberian *discount* juga mempengaruhi terjadinya pembelian tak terencana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Engel, James F., Roger D. Blackwell and Paul W. Miniard, 1994, *Perilaku Konsumen*, Alih Bahasa: F.X. Budiyanto, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2007, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Edisi 12, Edisi Terjemahan, PT. Indeks, Jakarta..
- Kotler, Philip and Gary Amstrong, 2001, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jilid 1, Edisi Kesembilan, Edisi Terjemahan, P.T. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Panjaitan, Thyophoida Wanty Suryani, 2011, *Pengaruh Harga, Promosi dan Produk Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Handphone Blackberry di Surabaya*, Jurnal Bisnis Perspektif, Vol. 3, No. 2, halaman 188-211.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, Edisi 1, Cetakan 1, Gava Media, Yogyakarta.
- Schiffman, Leon and Leslie Lazar Kanuk, 2008, *Perilaku Konsumen*, PT. Indeks, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Statistika Untuk Penelitian*, Edisi Ketiga, Alfabeta, Bandung.
- Supranto, J., 2001, *Statistik dan Aplikasi*, Edisi Lima, Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
- Suryani, Tatik, 2008, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Utami, Christina Whidya, 2010, *Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Zakiar, Emir, 2010, *Faktor-Faktor Pendorong Konsumen Melakukan Impulsive Buying pada Toko-toko Ritel Fashion di Jakarta*, FE UI.

**PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA TERHADAP
KUALITAS PELAYANAN PADA PERGURUAN TINGGI "X"
DI SURABAYA**

V. Ratna Inggawati

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

This research is to see how student assessment of the quality of service Perguruan Tinggi "X" as a whole based on the dimensions of physical evidence (tangible), reliability in delivering services (reliability), responsiveness in providing the service (responsiveness), guarantee (assurance) as well as the ability to give attention sincere customer (empathy). Respondents were drawn 100 students, it has been found that the dimensions of the physical evidence is a dimension that has the greatest negative GAP value and genuine concern dimension is the dimension with the smallest negative GAP. Being indicators that have the biggest GAP value is: Complete Library facilities.

Keywords: *tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, GAP*

PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan Tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen). Sedangkan Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu penyedia jasa, karenanya perguruan tinggi seperti halnya industri jasa lainnya, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya.

Dalam sektor jasa dikenal beberapa dimensi kualitas pelayanan seperti yang dikemukakan oleh Parasuraman et al. (1988) yaitu dimensi bukti fisik (*tangible*), keandalan dalam menyampaikan jasa (*reliability*), ketanggapan dalam memberikan jasa (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) serta kemampuan untuk memberikan perhatian tulus pada pelanggan (*empathy*).

Secara umum dipandang dari sisi pengelolaan, di Indonesia dikenal dua jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Walaupun perguruan tinggi negeri masih selalu menjadi pilihan utama, tetapi di banyak tempat, perguruan tinggi swasta lebih diminati karena dipandang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Perguruan Tinggi (PT) "X" di Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang semakin berkembang ditandai dengan semakin banyak calon mahasiswa yang menjadikan PT "X" sebagai pilihan untuk menuntut ilmu. Dari pihak pemerintah, PT "X" juga semakin dipercaya mengelola sejumlah dana hibah sebagai upaya percepatan perkembangan PT "X".

Untuk menunjang kemajuan dan pengembangan signifikan yang sudah berhasil diraih, sebagai suatu industri jasa, maka PT "X" juga harus mampu memberikan pelayanan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya (mahasiswa) dan diharapkan dapat menjadi sarana promosi dalam merekomendasikan ke calon mahasiswa lainnya. Walaupun PT "X" telah menerapkan standar pelayanan, namun kondisi riil di lapangan masih dinilai oleh sebagian mahasiswa belum maksimal. Untuk itulah perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut melalui suatu penelitian yang dapat mewakili kenyataan yang sebenarnya, yaitu bagaimana persepsi mahasiswa tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk menetapkan strategi pelayanan di masa mendatang.

Dari uraian tersebut maka dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penilaian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan PT "X" secara keseluruhan berdasarkan dimensi bukti fisik (*tangible*), keandalan dalam

menyampaikan jasa (*reliability*), ketanggapan dalam memberikan jasa (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) serta kemampuan untuk memberikan perhatian tulus pada pelanggan (*empathy*) dengan pendekatan model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1988). SERVQUAL dibangun dengan membandingkan dua faktor utama yaitu persepsi terhadap layanan yang diterima dibandingkan dengan harapan konsumen. Menurut Parasuraman et al. (1988) ada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) serta perhatian tulus (*empathy*).

Bukti fisik merupakan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Hal ini ditunjukkan oleh penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Penampilan dan kemampuan yang diberikan tersebut meliputi fasilitas fisik seperti gedung, perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan pegawainya.

Keandalan merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja yang ditampilkan harus sesuai dengan harapan pelanggan seperti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik serta dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Ketanggapan merupakan kemauan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan serta cepat mengakomodasi keluhan pelanggan. Jaminan yang ditampilkan bisa berupa pengetahuan yang dimiliki, kesopansantunan dan kemampuan pegawai yang akan menumbuhkan rasa percaya para pelanggannya terhadap perusahaan. Termasuk dalam dimensi ini adalah komponen komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

Empati adalah perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan kepada pelanggan dalam upaya memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik.

Berbagai penelitian sejenis pernah dilakukan dengan objek yang berbeda seperti yang dilakukan Lee et al. (2000) yang melakukan penelitian pada perusahaan jasa hiburan, kursus *aerobic* dan perusahaan jasa investasi. Lee et al. (2000) menemukan bahwa variabel *tangible* merupakan faktor yang penting pada industri berbasis peralatan dan *responsiveness* pada industri berbasis manusia. Penelitian lain yang dilakukan Sureshchandar et al. (2002) menemukan adanya hubungan yang sangat erat antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan pelanggan, semakin baik kualitas pelayanan maka besar kemungkinan konsumen akan semakin puas. Kelsey and Bond (2001) juga menggunakan dimensi kualitas pelayanan sebagai faktor penentu kepuasan konsumen dalam sebuah *Academic Centre of Excellence*. Patrisia dan Abror (2011) dalam penelitiannya berjudul Penilaian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan di Jurusan Ekonomi FIS UNP menemukan bahwa dimensi *tangible* dan *assurance* telah berkembang baik pada kinerja jurusan Ekonomi FIS UNP. Sedangkan Sari (2009) yang melakukan penelitian pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi menemukan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan Badan Perpustakaan Provinsi Jambi belum dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung perpustakaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *cross sectional* yang diambil dengan melakukan *survey* pada waktu tertentu. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) serta perhatian tulus (*empathy*), menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui *survey* langsung kepada responden dengan menggunakan sejumlah pernyataan yang tersusun dalam kuesioner. Pernyataan dalam kuesioner cukup dijawab oleh responden dengan mencontreng pilihan jawaban menggunakan skala mulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S) dan sangat setuju (SS). Setiap jawaban akan diberi bobot yaitu 1 untuk STS dan berturut-turut sampai 5 untuk SS.

*Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan
Pada Perguruan Tinggi “X” di Surabaya*

Setiap responden akan mengisi kuesioner yang jawabannya disusun berdampingan antara jawaban yang mewakili tingkat persepsi dan tingkat harapan. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Wikipedia) sedangkan Harapan atau asa menurut Wikipedia adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan sebuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahkan terkadang, dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu.

Populasi adalah seluruh mahasiswa aktif PT “X” yang terdaftar pada semester genap tahun akademik 2012-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dan diambil sebanyak 100 orang responden dengan pertimbangan ketentuan yang dikemukakan oleh Hair et al. (1998) jumlah sampel adalah minimal 5 – 20 kali banyaknya variabel yang digunakan, yaitu 5 variabel sehingga jumlah sampel adalah 5 x 20 atau 100 orang responden.

Pada tahap awal untuk menentukan kesesuaian kuesioner dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan nilai *cronbach alpha* dan untuk menentukan apakah indikator yang digunakan memang berkorelasi kuat dengan dimensi bukti fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) serta perhatian tulus (*empathy*). Selanjutnya digunakan metoda *importance performance analysis* yang merupakan sebuah teknik analisis deskriptif yang diperkenalkan oleh Martilla and James (1977) dalam Basri (2011) dan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan oleh suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa (konsumen). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS 17. Tabel 1 di halaman berikut ini menunjukkan variabel operasional penelitian yang digunakan.

*Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan
Pada Perguruan Tinggi “X” di Surabaya*

Tabel 1
Variabel Operasional Penelitian

Variabel	Pengertian	Indikator	Item/Atribut		Satuan Pengukuran	Skala
Bukti fisik (<i>tangibles</i>)	semua fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran, penampilan karyawan, bangunan dan fasilitas lainnya, termasuk penataan, kebersihannya dengan indikator pengukuran yang digunakan untuk mengungkapkan bukti fisik tersebut	kecukupan dan tampilan fisik	1	PT “X” menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan layanan	tingkat kepentingan dan tingkat kinerja	ordinal
			2	Gedung / bangunan memadai		
			3	Fasilitas fisik (ruang belajar) yang dimiliki memadai		
			4	Fasilitas laboratorium yang dimiliki memadai		
			5	Fasilitas kamar mandi yang dimiliki memadai		
			6	Fasilitas kantin yang dimiliki memadai		
			7	Fasilitas parkir yang dimiliki memadai		
			8	PT “X” memiliki fasilitas internet dan jurnal		
			9	Ruang administrasi (BAA, BAU, PMB) tertata rapi		
			10	Fasilitas perpustakaan lengkap		
			11	Ruang perpustakaan tertata rapi		
			12	Materi-materi yang berhubungan dengan pelayanan (mis: pengumuman atau pamphlet) mudah terlihat		
			13	Karyawan PT “X” berpenampilan rapi		
Kehandalan (<i>reliability</i>)	kemampuan yang diberikan kepada mahasiswa secara tepat waktu, sesuai dengan yang dijanjikan	kemampuan melayani dengan cepat	14	Pelayanan kepada mahasiswa dilakukan tepat waktu	tingkat kepentingan dan tingkat kinerja	ordinal
			15	Karyawan selalu dapat ditemui pada jam kerja		
			16	Dosen dan pejabat struktural dapat ditemui pada jam kerja		
			17	Janji-janji yang diberikan kepada mahasiswa ditepati sesuai yang dijanjikan		
			18	PT “X” memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan atau masalah		
Daya tanggap (<i>responsiveness</i>)	keinginan dari seluruh karyawan memberikan layanan kepada mahasiswa dengan tanggap cepat dan tepat	kemauan membantu	19	PT “X” memiliki bagian administrasi yang menangani dokumen-dokumen dengan cermat	tingkat kepentingan dan tingkat kinerja	ordinal
			20	Dosen / karyawan memberikan informasi dengan jelas dan terinci		
			21	Karyawan administrasi dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat		
			22	Karyawan selalu bersedia membantu kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa		
Jaminan (<i>assurance</i>)	kompetensi dalam bidang masing-masing dan perlakuan ramah yang diberikan oleh karyawan	pengetahuan dan kesopanan	23	Karyawan bersedia meluangkan waktu untuk menanggapi permintaan mahasiswa dengan cepat	tingkat kepentingan dan tingkat kinerja	ordinal
			24	Seluruh karyawan memiliki kompetensi dalam bidang kerjanya		
			25	Seluruh karyawan berlaku ramah dan sopan kepada mahasiswa		
Perhatian (<i>empathy</i>)	kemudahan dan kenyamanan yang didapatkan mahasiswa dalam berhubungan dengan karyawan, maupun pejabat struktural dan dosen	kepedulian terhadap mahasiswa	26	Seluruh karyawan memiliki pengetahuan untuk menjelaskan tentang PT “X”	tingkat kepentingan dan tingkat kinerja	ordinal
			27	Seluruh karyawan dengan senang hati dan sabar melayani kebutuhan mahasiswa		
			28	Bagian administrasi memiliki jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa		
			29	Jam buka perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa		
			30	Pejabat struktural / dosen memiliki jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kuesioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan, seluruh item dalam kuesioner ternyata valid dan reliabel, sehingga kuesioner dianggap layak dipergunakan untuk penelitian ini. Setelah dilakukan perhitungan dan pengukuran maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan di PT “X” belum memuaskan. Hal tersebut terlihat dari hasil perbandingan antara tingkat harapan dan tingkat persepsi yang bernilai negatif.

Tabel 2
Skor Kualitas Pelayanan

DIMENSI	Nilai rata-rata		GAP
	Persepsi	Harapan	
Bukti fisik (<i>tangibles</i>)	2.95	3.46	-0.51
Kehandalan (<i>reliability</i>)	2.99	3.23	-0.24
Daya tanggap (<i>responsiveness</i>)	3.13	3.29	-0.16
Jaminan (<i>assurance</i>)	3.06	3.29	-0.23
Perhatian (<i>empathy</i>)	3.42	3.56	-0.14

Sumber: data diolah

Dari Tabel 2 di atas diketahui bahwa dimensi kualitas pelayanan yang ada memiliki tingkat persepsi di bawah tingkat harapan, sehingga skor GAP bernilai negatif pada semua dimensi kualitas pelayanan yang diukur. Skor negatif paling kecil adalah variabel perhatian (*empathy*) dan yang paling besar Bukti fisik (*tangibles*). Skor GAP kualitas pelayanan yang bernilai negatif menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat persepsi dan tingkat harapan mahasiswa. Semakin besar kesenjangan negatif maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan belum optimal.

Kualitas Pelayanan Masing-masing Dimensi

Untuk mengetahui secara jelas mengenai perbandingan tingkat persepsi dan harapan pada masing-masing dimensi akan diperlihatkan dalam tabel-tabel selanjutnya.

*Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan
Pada Perguruan Tinggi "X" di Surabaya*

1. Dimensi bukti fisik (*tangibles*):

Tabel 3

Skor Kualitas Pelayanan pada Dimensi bukti fisik (*tangibles*)

Indikator	Rata-rata		GAP
	Persepsi	Harapan	
PT "X" menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan layanan	2.97	3.67	-0.70
Gedung / bangunan memadai	2.86	3.87	-1.01
Fasilitas fisik (ruang belajar) memadai	2.90	3.71	-0.81
Fasilitas laboratorium yg dimiliki memadai	2.29	3.13	-0.84
Fasilitas kamar mandi yg dimiliki memadai	3.07	3.49	-0.42
Fasilitas kantin yg dimiliki memadai	2.24	3.35	-1.11
Fasilitas parkir yg dimiliki memadai	3.16	3.31	-0.15
PT "X" memiliki fasilitas internet dan jurnal	3.36	3.31	0.05
Ruang adm (BAA,BAU,PMB) tertata rapi	3.28	3.54	-0.26
Fasilitas Perpustakaan lengkap	2.39	3.70	-1.31
Ruang Perpustakaan tertata rapi	2.99	3.06	-0.07
Materi yg berhub dg pelayanan (mis:pengumuman / pamphlet) mudah terlihat	3.17	3.23	-0.06
Karyawan PT "X" berpenampilan rapi	3.61	3.6	0.01

Sumber: data diolah

Dari tigabelas indikator pada dimensi ini, indikator fasilitas perpustakaan lengkap memiliki nilai GAP negatif terbesar, yaitu -1.31, selanjutnya indikator Fasilitas kantin yg dimiliki memadai dan indikator Gedung / bangunan memadai dengan nilai GAP negatif masing-masing sebesar -1.11 dan -1.01.

Tetapi dua indikator mempunyai nilai GAP positif, yaitu PT "X" memiliki fasilitas internet dan jurnal dan indikator Karyawan PT "X" berpenampilan rapi, masing-masing dengan nilai GAP 0.05 dan 0.01.

2. Dimensi kehandalan (*reliability*):

*Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan
Pada Perguruan Tinggi "X" di Surabaya*

Tabel 4
Skor Kualitas Pelayanan pada Dimensi Kehandalan (*reliability*)

Indikator	Rata-rata		GAP
	Persepsi	Harapan	
Pelayanan kpd mhsw dilakukan tepat waktu	2.52	3.21	-0.69
Karyawan selalu dapat ditemui pada jam kerja	3.05	3.20	-0.15
Dosen & pejb structural dpt ditemui pd jam kerja	3.10	3.13	-0.03
Janji yg diberikan kpd mhsw ditepati sesuai yg dijanjikan	3.13	3.12	0.01
PT "X" memberikan perhatian yg sungguh2 kpd mhsw yg mengalami kesulitan / mslh	3.14	3.19	-0.05
PT "X" memiliki bagian adm yg menangani dokumen2 dg cermat	2.98	3.50	-0.52

Sumber: data diolah

Untuk dimensi kehandalan (*reliability*) nilai GAP negatif terbesar adalah indikator Pelayanan kpd mhsw dilakukan tepat waktu, yaitu -0.69 kemudian indikator PT "X" memiliki bagian adm yg menangani dokumen2 dg cermat sebesar -0.52, sedangkan indicator: Janji yg diberikan kpd mhsw ditepati sesuai yg dijanjikan mempunyai nilai GAP positif 0.01.

3. Dimensi daya tanggap (*responsiveness*):

Tabel 4
Skor Kualitas Pelayanan pada Dimensi Daya tanggap (*responsiveness*)

Indikator	Rata-rata		GAP
	Persepsi	Harapan	
Dosen / karyawan memberikan informasi dengan jelas dan terinci	3.06	3.45	-0.39
Karyawan adm dpt memberikan layanan dengan cepat dan tepat	3.23	3.31	-0.08
Karyawan selalu bersedia membantu kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa	3.19	3.24	-0.05
Karyawan bersedia meluangkan waktu untuk menanggapi permintaan mahasiswa dengan cepat	3.02	3.15	-0.13

Sumber: data diolah

*Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan
Pada Perguruan Tinggi "X" di Surabaya*

Keempat indikator dalam dimensi ini mempunyai nilai GAP negatif, yang terbesar pada indikator Dosen/karyawan memberikan informasi dg jelas dan terinci, yaitu sebesar -0.39.

4. Dimensi jaminan (*assurance*):

Tabel 5

Skor Kualitas Pelayanan pada Dimensi Jaminan (*assurance*)

Indikator	Rata-rata		GAP
	Persepsi	Harapan	
Seluruh karyawan memiliki kompetensi dalam bidang kerjanya	3.01	3.14	-0.13
Seluruh karyawan berlaku ramah dan sopan kepada mahasiswa	3.17	3.34	-0.17
Seluruh karyawan memiliki pengetahuan untuk menjelaskan	3.01	3.29	-0.28

Sumber: data diolah

Seluruh indikator yang diambil untuk mewakili dimensi jaminan (*assurance*) bernilai GAP negatif, berturut-turut terbesar adalah Seluruh karyawan memiliki pengetahuan untuk menjelaskan, seluruh karyawan berlaku ramah dan sopan kepada mahasiswa, seluruh karyawan memiliki kompetensi dalam bidang kerjanya dengan nilai GAP negatif mulai dari -0.28, -0.17 dan -0.13.

5. Dimensi Perhatian (*empathy*):

Tabel 6

Skor Kualitas Pelayanan pada Dimensi Perhatian (*empathy*)

Indicator	Rata-rata		GAP
	Persepsi	Harapan	
Seluruh karyawan dengan senang hati dan sabar melayani kebutuhan mahasiswa	3.47	3.50	-0.03
Bagian administrasi memiliki jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	3.44	3.57	-0.13
Jam buka perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	3.60	3.77	-0.17
Pejabat struktural/dosen memiliki jam kerja yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa	3.17	3.41	-0.24

Sumber: data diolah

Keempat indikator dalam dimensi ini kesemuanya juga bernilai GAP negatif, yang terbesar untuk indikator pejabat struktural/dosen memiliki jam kerja yg sesuai dg kebutuhan mhsw, yaitu sebesar -0.24.

Analisa Kualitas Pelayanan pada PT "X"

Dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa PT "X" belum dapat memenuhi harapan mahasiswa, hal tersebut terlihat dari rata-rata tingkat persepsi lebih rendah daripada tingkat harapan. Hal ini juga semakin terlihat dari nilai GAP masing-masing indikator, sebagian besar adalah bernilai GAP negatif. Dimensi yang memberikan nilai GAP terbesar adalah Bukti fisik (*tangibles*) dan yang memberikan nilai GAP terkecil adalah Perhatian (*empathy*).

1. Bukti fisik (*tangibles*): dimensi ini memiliki nilai GAP negatif terbesar diantara kelima dimensi yang diteliti, yaitu sebesar -0.51. mahasiswa merasa belum puas terutama terhadap fasilitas perpustakaan, fasilitas kantin dan gedung yang kurang memadai, tetapi untuk fasilitas internet dan penampilan umum dari karyawan, mahasiswa sudah merasa puas.
2. Kehandalan (*reliability*): dimensi ini memiliki GAP negatif terbesar kedua, yaitu sebesar -0.24. Mahasiswa tidak puas terhadap ketepatan waktu terhadap pelayanan dan ketidakcermatan karyawan bagian administrasi, akan tetapi mahasiswa puas dengan ketetapan pemenuhan janji-janji seperti yang telah dijanjikan.
3. Daya tanggap (*responsiveness*): dimensi ini memiliki GAP negatif keempat, yaitu sebesar -0.16. Nilai GAP negatif terbesar adalah untuk indikator dosen/karyawan memberikan informasi jelas/terinci. Hal ini mengisyaratkan bahwa masih banyak dosen/karyawan yang memberikan informasi yang kurang dapat dimengerti oleh mahasiswa.
4. Jaminan (*assurance*): dimensi ini memiliki nilai GAP negatif ketiga, yaitu sebesar -0.23. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih belum yakin atas jaminan yang diberikan oleh dosen/karyawan dan berharap dapat lebih ditingkatkan lagi.

5. Perhatian (*empathy*): dimensi ini memiliki nilai GAP negatif paling kecil, yaitu sebesar -0.14. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cukup puas dengan perhatian yang diberikan oleh dosen/karyawan, tetapi masih berharap untuk dapat lebih ditingkatkan lagi

KESIMPULAN

1. Secara umum kualitas pelayanan yang diberikan belum dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa pada umumnya, hal ini terlihat dari GAP antara tingkat persepsi dan harapan pada sebagian besar indikator bernilai negatif.
2. Dimensi dengan nilai GAP negatif paling besar, yaitu dimensi bukti fisik, sedang indikator dengan nilai GAP negatif paling kecil adalah dimensi perhatian.
3. Berdasarkan seluruh indikator yang diteliti, indikator dengan GAP paling besar adalah fasilitas perpustakaan lengkap.
4. Mahasiswa menganggap bahwa dimensi perhatian sangat penting bagi mereka, hal tersebut ternyata bahwa dimensi perhatian mempunyai nilai rata-rata tingkat persepsi dan harapan lebih besar diantara dimensi yang lainnya.
5. Sebagian responden memberikan point harapan terlalu tinggi sesuai dengan yang mereka inginkan dan sering hanya didasari keinginan menuntut, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

SARAN

Pejabat struktural/dosen dan karyawan harus lebih memperhatikan indikator dengan tingkat GAP negatif besar karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan, sedangkan indikator dengan tingkat GAP negatif lebih kecil harus terus diupayakan perbaikannya agar dapat memperkecil tingkat GAP yang ada, sedang untuk indikator dengan tingkat GAP positif harus terus dipertahankan dan terus ditingkatkan agar semakin memberikan nilai kepuasan bagi mahasiswanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Basri, Seta, 2011, *Analisis Kuadran Harapan dan Persepsi Publik*. Di-download dari setabasri01.blogspot.com/.../analisis-deskriptif-dengan-importance.html pada tanggal 20 Juni 2013.
- Hair, Joseph F. Jr., Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, William C. Black, 1998, *Multivariate Data Analysis*, 5th ed, Prentice Hall Inc. Upper Saddle River, NJ.
- Kelsey, Kathleen Dodge and Julie A. Bond, 2001, *A Model for Measuring Customer Satisfaction Within An Academic Centre of Excellence*, Journal of Managing Service Quality, Vol. 11, Issue 5, page 359-368.
- Lee, Haksik, Yongki Lee and Dongkeun Yoo, 2000 *The Determinants of Perceived Service Quality and its Relationship with Satisfaction*, Journal of Services Marketing, Vol. 14 No. 3, page 217-231.
- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml and Leonard L. Berry, 1988, *Servqual: A multiple-item Scale for Measuring consumer Perceptions of Service Quality*, Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, page 12-40.
- Patrisia, Dina dan Abror, 2011, *Penilaian Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan di Jurusan Ekonomi FIS UNP*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Sari, Novita, 2009, *Analisis Kualitas Pelayanan Badan Perpustakaan Provinsi Jambi*.
- Sureshchandar, G.S., Chandrasekharan Rajendran and R.N. Anantharaman, 2002, *The Relationship Between Service Quality and Customer Satisfaction – A Factor Specific Approach*, Journal of Services Marketing, Vol. 16, Issue 4, page 363-379.
- id.wikipedia.org/wiki/Harapan
- id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
- ml.scribd.com/doc/135350601/analisis-IPA